

**INTERAKSI ANTAR AKTOR
DALAM KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN
PASAR WISATA BELANJA TUGU DI KOTA MALANG
(Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

Lingga Perkasa

NIM. 105030100111021



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2014

*Do what You can With what You
have, Where You are...*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Interaksi Antar Aktor Dalam kebijakan penataan dan Pengelolaan
Pasar Wisata Belanja tugu Di Kota Malang (Studi di Pasar Wisata
Belanja Tugu Kota Malang)

Disusun Oleh : Lingga Perkasa

NIM : 105030100111021

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Juni 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Mardiyono. MPA
NIP. 19520523 197903 1 001



Wima Yudo Prasetyo S.Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

TANDA PENGESAHAN

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI,
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA, PADA :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juli 2014

Jam : 08.00 WIB

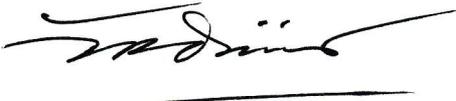
Skripsi atas Nama : Lingga Perkasa

Judul : Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan
Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Di Kota Malang
(Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

KETUA



Dr. Mardiyono, MPA

NIP. 19520523 197903 1 001

ANGGOTA



Dr. Tjahjanulin Domai, MS

NIP. 19531222 1980101 001

ANGGOTA



Wima Y. Prasetyo, S.Sos, MAP

NIP. 19790523 200604 1 002

ANGGOTA



Farida Nurani, S.Sos, M.Si

NIP. 19700721 200501 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2)

Malang, Juni 2014



Ringkasan

Lingga Perkasa, Program Sarjana Universitas Brawijaya, Malang Juni 2014, **Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Di Kota Malang (Studi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang)**. Ketua Komisi Pembimbing : Dr. Mardiyono, MPA , Anggota : Wima Yudo Prasetyo S.Sos, MAP.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Malang mempunyai potensi sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat, potensi yang ada ini dapat dilihat melalui perkembangan jumlah UMKM yang terus meningkat setiap tahunnya, berada dalam semua sektor ekonomi dan mempunyai kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang cukup baik. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kota Malang sebagai wadah UMKM untuk mengembangkan potensi yang ada melalui penataan dan pengelolaan. Salah satunya melalui Pasar Wisata Belanja Tugu, yang merupakan wadah bagi para pedagang untuk berjualan dengan fasilitas yang memadai seperti tenda, ruang yang cukup luas, dan kebersihan lingkungan yang selalu dijaga. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah masalah terkait dengan pengelolaan Pasar Wisata dan pengembangannya, tuntutan masyarakat yang beragam mengakibatkan terjadi pembatasan jumlah pedagang yang berjualan, koordinasi yang kurang mumpuni dan kerjasama yang diharapkan ada untuk mengembangkan Pasar Wisata menjadi terhambat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang melalui kebijakan yang mumpuni dan mampu menjadi jembatan bagi penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan pedagang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Sumberdata berasal dari informan, dokumen-dokumen, serta tempat dan peristiwa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang sudah melakukan berbagai upaya yang dapat mendukung perkembangan Pasar Wisata seperti melakukan koordinasi penataan, promosi, penciptaan iklim yang baik untuk pedagang, menempatkan pedagang di pusat keramaian kota. Tetapi masih terdapat kekurangan dalam bidang kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan Pasar Wisata ini, ditambah lagi ketidakmampuan pemerintah Kota Malang dalam mengatasi tuntutan pedagang untuk menambah jumlah anggota serta membuka lahan baru atau cabang bagi pedagang lainnya. Tuntutan ini memang dirasa sangat perlu untuk mendapat perhatian khusus dan dapat masuk sebagai sebuah agenda kebijakan melihat potensi yang besar dan animo masyarakat terhadap Pasar Wisata Belanja Tugu, serta omset setiap minggu yang dapat dihasilkan oleh para pedagang.

Summary

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) in Malang have the potential as a drive wheel community economic, the existing potential can be seen through the development of the number of UMKM growing every year, are in all sectors of economic and have ability to absorb labor good enough. For that the need for special attention from the government Malang as a container UMKM to develop the existing potential through the arrangement and management. One of them through Pasar Wisata Belanja Tugu, which is container for traders to sell with adequate facilities such as a tent, a large enough, and environmental hygiene is always maintained. One of the problems main faced by the Government of Malang in this case the Department of Culture and Tourism is a problem associated with the market management Tourism and development, the demands of diverse society lead to take place restrictions on the number of traders selling, coordination less qualified and cooperation to expect there is to develop Travel Market be hampered.

This study aims to describe, analyze and interpret the arrangement and management of Pasar Wisata Belanja Tugu Malang through policies that qualified and able to be a bridge for the completion of the problems associated with traders. In this study using qualitative approach, with this type of descriptive. Sumberdata derived from informants, documents, as well as the place and events. Data analysis techniques used is the analysis of interactive model that is to reduce the data, presents data and draw conclusions.

The results showed that the Department of Culture and Tourism Malang've done efforts that can support market developments like to coordinate the arrangement, promotion, the creation of a good climate weeks to traders, put traders in downtown. But there are still shortcomings in the field of cooperation with private parties to develop Pasar Wisata, plus the inability of the government Malang in overcoming the demands of traders to increase the number of member and open new land or branch for other traders. This demand is considered very necessary to special attention and can be entered as a policy agenda see a great potential and public interest to the Pasar Wisata belanja Tugu, as well as turnover of each week that can be produced by traders.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



*Dipersembahkan untuk Bapak dan Ibu
serta Saudara-saudara yang terkasih*

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :
Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan berbagai fasilitas kemudahan dalam mencari data dan mengakses kebutuhan untuk penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Mardiyono, MPA selaku pembimbing utama dan Bapak Wima Yudo Prasetyo S.Sos, MAP selaku pembimbing anggota yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Rekan-rekan pada program studi ilmu administrasi publik angkatan 2010 yang telah berperan dalam memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada ayah dan ibu yang telah memberikan dorongan dan doa yang tulus mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

Malang, 30 Juni 2014

Lingga Perkasa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis naikkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kasih yang telah memberikan karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Segala sesuatu yang terjadi selama masa penulisan skripsi ini, baik berupa kebahagiaan, kesedihan, keputusasaan, kejenuhan, dan kemalasan, penulis yakini semuanya terjadi guna menempa penulis untuk menjadi lebih dekat dan bergantung kepada-Nya. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Berbagai masukan, dorongan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari banyak pihak amat penulis syukuri dan hargai sebagai bagian hidup penulis. Kepada semua pihak tersebut, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS Selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, MS Selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Sarjana Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr. Mardiyono, MPA dan Bapak Wima Yudo Prasetyo S.Sos, MAP Dalam kedudukannya sebagai dosen pembimbing yang berkenan meluangkan waktunya dan dengan sabar dan bijaksana serta dengan penuh kekritisn membimbing dan memberikan dukungan serta koreksi dan saran yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS dan Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si dalam

- kedudukannya sebagai penguji yang telah berkenan meluangkan waktu untuk .menguji dan memberikan saran serta perbaikan untuk skripsi yang lebih baik
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Administrasi Publik yang telah mengajar penulis selama penulis kuliah sehingga keilmuan penulis semakin bertambah.
 7. Orang tua penulis, Bapak Agus Pudjo W. dan Ibu Suhartatik yang dengan kegigihan bekerja keras untuk mendukung pendidikan penulis dan selalu mengajarkan hidup disiplin dan bekerja keras, serta melakukan semuanya di dalam kejujuran. Terima kasih juga penulis sampaikan atas perhatian dari adik-adik penulis, Lovisa, dan Jessica. Beserta kerabat penulis, Bapak Bambang Ismiarso dan Ibu Ester Anita yang juga telah memberikan pelajaran hidup dan saran yang membangun kepada penulis.
 8. Sahabat-sahabat penulis, Mujianto, Jo, Adit, Tery, Brahma dan Dyah Ayu yang telah berbagi pengalaman hidup dengan penulis dan memberi keberanian kepada penulis untuk menampilkan diri apa adanya.
 9. Terakhir tetapi tidak yang terkecil, karena tanpa kasih sayangnya, pengertian, kebersamaan, dan konsistensinya dalam doa setiap hari maka niscaya skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu, oleh karenanya rasa terima kasih penulis sampaikan kepada yang terkasih Santi Budiman yang telah banyak berkorban waktu demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 30 Juni 2014



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Kerangka Pemikiran	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kebijakan publik	
1. Pengertian Kebijakan Publik	13
2. Bentuk-bentuk Kebijakan Publik	15
3. Proses Kebijakan Publik	17
B. Implementasi Kebijakan Publik	
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
2. Model-model Implementasi Kebijakan Publik	21
3. Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik	25
C. <i>Stakeholder</i>	
1. Definisi <i>Stakeholder</i>	27
2. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	28
3. Analisis <i>Stakeholder</i>	31
4. Interaksi Antar <i>Stakeholder</i>	32
D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
1. Pemberdayaan	36
2. Strategi Pemberdayaan	38
E. Ekonomi Politik	
1. Pendekatan Klasik	40



2. Pendekatan NeoKlasik	43
3. Pendekatan Keynesian	44
F. Penelitian Terdahulu	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	49
B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi dan Situs Penelitian	52
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Instrumen Penelitian	55
G. Metode Analisis Data	56
H. Keabsahan Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Malang	60
1.1 Kondisi Geografis	60
1.2 Iklim dan Cuaca	63
1.3 Geologi dan Morfologi	63
1.4 Demografi	64
1.5 Kondisi Perekonomian	67
1.6 Kondisi Perdagangan	70
B. Hasil Fokus Penelitian	
1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai PWBT	
1.1 Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dan Penataan Kepada Dinas Kebudayaan	
1.2 Tindakan Dan Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	82
1.3 Upaya Stategis yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Kota Malang Dalam Peningkatan Potensi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	89
2. Interaksi Antar Aktor Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	
2.1 Kerjasama dalam pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	93
2.2 Peran Masing-Masing Stakeholder Dan Keterlibatan Publik	
2.3 Hambatan Dalam Proses Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	
C. Pembahasan	

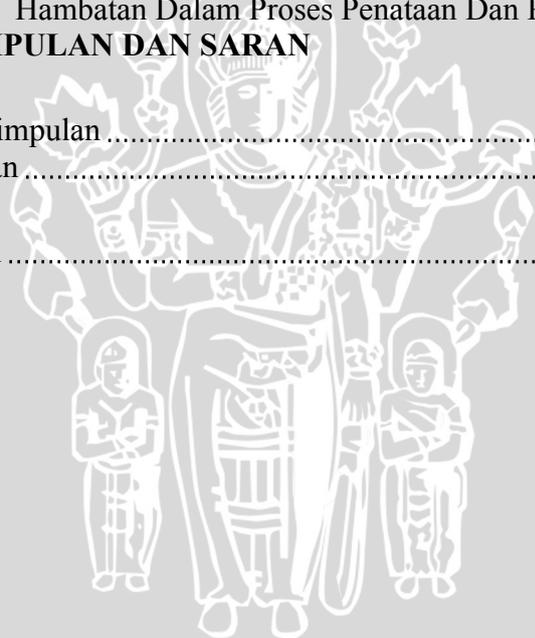


1.	Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai PWBT	
1.1	Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dan Penataan Kepada Dinas Kebudayaan	
1.2	Tindakan Dan Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	109
1.3	Upaya Stategis yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Kota Malang Dalam Peningkatan Potensi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	114
2.	Interaksi Antar Aktor Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	
2.1	Kerjasama dalam pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	116
2.2	Peran Masing-Masing Stakeholder Dan Keterlibatan Publik	
2.3	Hambatan Dalam Proses Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang	

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

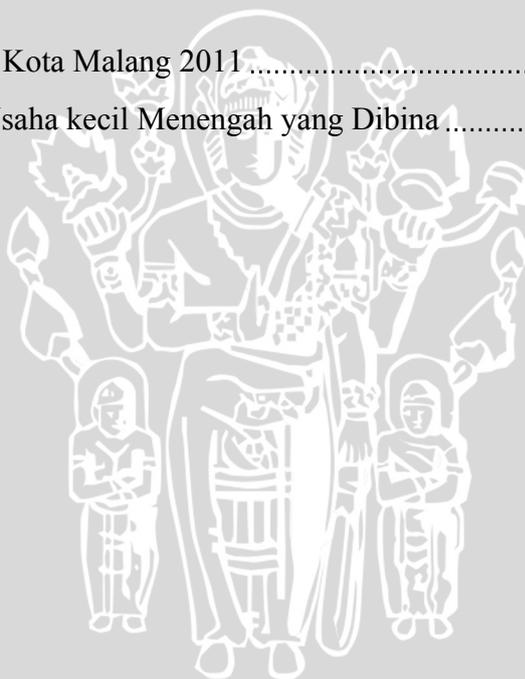
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	129

DAFTAR PUSTAKA	131
-----------------------------	-----



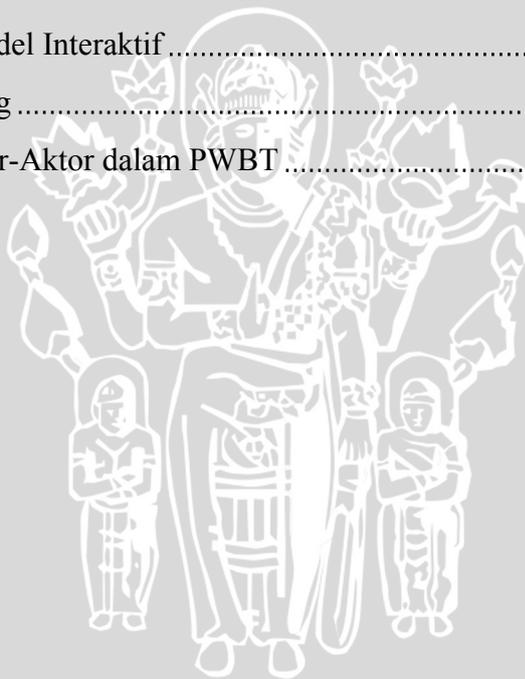
DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1	Pembagian Wilayah Kota Malang	62
2	Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk	65
3	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja	66
4	Kebutuhan hidup Layak dan Upah Minimum Kota Malang	67
5	Peranan ekonomi sektoral dari PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2011	68
6	Hasil Penghitungan LQ Potensi Sektor Basis dan Non Basis tahun 2012 71	
7	Realisasi Ekspor Kota Malang 2011	73
8	Perkembangan Usaha kecil Menengah yang Dibina	87



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hlm.
1	Kebijakan Publik Ideal	15
2	Tingkat Keberhasilan Kebijakan Publik	21
3	Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn	22
4	Model Grindle	23
5	<i>Tipe Pooled</i>	33
6	<i>Tipe Sequential</i>	34
7	<i>Tipe Resiprocal</i>	35
8	Analisis data model Interaktif	58
9	Peta Kota Malang	62
10	Identifikasi Aktor-Aktor dalam PWBT	98



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara ataupun daerah, peran penting tersebut akhirnya juga mendorong berbagai negara untuk mengembangkan UMKM termasuk Indonesia. Peran UMKM yang paling utama dimulai sejak krisis moneter tahun 1998 di Indonesia yang dipandang sebagai sebuah bentuk trobosan baru dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan peluang berusaha dan kesempatan kerja, kebijakan pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah langkah yang cukup strategis dalam meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peranan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan nasional, jumlah unit usaha dan pengusaha, serta penyediaan lapangan kerja. Kontribusi UMKM dalam PDB pada tahun 2010 sebesar 52,7% dari seluruh total PDB nasional, sedangkan pada tahun 2011 kontribusi UMKM baru mencapai kisaran 53,1% dari total PDB nasional. Pada tahun 2011, jumlah UMKM sebanyak 47,4 juta yang sebagiannya besar

merupakan usaha dalam skala mikro, dan menyerap hampir 79 juta tenaga kerja di semua lapisan. Jumlah UMKM dan tenaga kerja rata-rata setiap tahunnya meningkat 3,25% dan 3,31% dari tahun 2011 yang berjumlah sekitar 42,7 juta usaha dan 78,6 juta orang di sektor UMKM. Perkembangan UMKM yang begitu besar mengisaratkan bahwa ada potensi besar yang terkait usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui UMKM (berdasarkan *Berita Resmi Statistik No. 26 / VI / 12 Mei 2012*).

Dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh badan pusat statistik nasional (BPS) pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun jumlah unit usaha yang ada di Indonesia meningkat sekitar 5,3 juta dari 16,4 juta pada tahun 2001 menjadi 21,7 juta unit usaha pada tahun 2011. Dari hasil peningkatan tersebut diketahui sekitar 83,43% merupakan usaha dalam kategori usaha mikro, sedangkan sekitar 15,85% merupakan usaha kecil. Sedangkan untuk usaha sedang dan besar hanya berkisar 196,400 unit saja atau tidak kurang dari satu persen total keseluruhan pertumbuhan usaha yang ada. Hasil dari sensus yang dilakukan BPS juga menunjukkan bahwa sekitar 43,03% atau 9,8 juta unit usaha yang ada tidak memiliki tempat permanen untuk menjalankan usahanya. Usaha tanpa lokasi atau tempat permanen ini merupakan ciri khas dari ekonomi masyarakat di Indonesia. Sekitar 43% dari seluruh unit usaha yang ada tidak memiliki lokasi usaha yang tetap dan hal ini dikategorikan sebagai usaha informal, misalnya pedagang kaki lima, ojek, atau pedagang keliling.

Perdagangan menurut sensus badan pusat statistik (BPS) tahun 2011 hampir seluruhnya didominasi oleh sektor perdagangan, yang bergerak baik usaha

sekala besar dan menengah maupun usaha mikro, kecil. Selain itu potensi lain yang cukup besar adalah usaha yang bergerak dalam bidang industri serta perhotelan. Tingkat penyerapan yang ada selama perkembangan usaha mikro kecil dan menengah berkisar 450 juta rupiah pertahun dan bahkan dalam beberapa perhitungan dapat mencapai 1,2 Milyar rupiah pertahun. Tentu saja penyerapan ekonomi ini sangat tinggi dan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi penyerapan sumberdaya manusia usaha mikro dapat menyerap tenaga kerja sekitar 5 sampai 19 orang setiap unit usaha dengan kata lain dari total jumlah pertumbuhan usaha mikro yang ada menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang relatif cukup tinggi dan diharapkan akan mampu mengimbangi jumlah pertumbuhan tenaga siap kerja yang ada di Indonesia.

Tetapi sayangnya perkembangan yang pesat dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini masih belum diimbangi oleh perkembangan kualitas UMKM yang memadai. Masalah yang sedang dihadapi oleh UMKM sekarang ini merupakan masalah klasik yang terjadi di banyak negara yaitu masalah tingkat produktivitas yang sangat rendah. Keadaan ini secara langsung berkaitan dengan (i) rendahnya kualitas sumberdaya manusia khususnya manajemen, organisasi, teknologi, dan pemasaran (ii) lemahnya kompetensi kewirausahaan, (iii) terbatasnya kapasitas UMKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar serta faktor produksi lainnya atau dengan kata lain pemerintah atau *stakeholder* belum memberikan dukungan untuk perkembangan dan kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang ada.

Sementara itu faktor eksternal yang dihadapi adalah (i) besarnya biaya

transaksi akibat kurang mendukungnya iklim usaha, (ii) praktek usaha yang kurang sehat dan (iii) keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha, selain itu UMKM juga menghadapi tantangan global dimana tingkat perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan menciptakan sebuah iklim ekonomi yang tidak kondusif bagi perkembangan UMKM.

Kemampuan UMKM untuk bersaing baik dalam perdagangan domestik maupun mancanegara yaitu ekspor tidak lepas dari peran *stakeholder* yang mendukung dalam kegiatan perkembangan UMKM tersebut. Peran pemerintah contohnya, sebagai pemegang kewenangan utama untuk menciptakan sebuah peraturan yang mampu memberikan angin segar bagi masyarakat akan usahanya akan sangat berguna untuk keberlanjutan usaha masyarakat. Belum lagi peran pemerintah sebagai pengayom masyarakat yang mendengarkan keluhan serta permasalahan yang ada di dalam masyarakat atau terkait dengan UMKM itu sendiri. Pemerintah diharapkan akan mampu memberikan sumbangsi besar bagi perkembangan yang ada, tentunya kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah sangat terbatas. Untuk itu tidak hanya pemerintah sebagai pemegang kewenangan utama yang berperan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan melalui UMKM tetapi partisipasi masyarakat dan peran sektor swasta dalam melakukan manajemen perencanaan terhadap usaha mikro kecil dan menengah juga menciptakan sebuah pola hubungan yang saling mendukung untuk perkembangan daerah baik usaha yang bergerak dalam skala besar maupun skala mikro.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang Otonomi daerah, telah berpengaruh secara nyata terhadap sistem pemerintahan dan keuangan. Dari

sentralisasi menuju desentralisasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dimana pemberian otonomi daerah tersebut adalah dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, termasuk dalam hal ini terutama adalah kewenangan dalam sentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 tahun 1999.

Penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mengandung suatu implikasi bahwa transfer dana ke daerah melalui dana perimbangan menunjukkan jumlah yang semakin besar, sehingga kemampuan keuangan daerah meningkat disertai dengan peningkatan kewenangan dalam pengelolaannya. Peningkatan dana perimbangan tersebut perlu diikuti dengan pengalokasian dana yang lebih memadai untuk sektor pembinaan UMKM, termasuk didalamnya bantuan keuangan kepada UMKM. Dengan demikian tercipta sebuah hubungan yang jelas antara pemerintah dan masyarakat yang menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap peningkatan UMKM jelas dan nyata.

Dalam penerapannya di lapangan kenyataan ini jauh dari harapan, dukungan dan pola sinergitas yang diharapkan tercipta dari berbagai *stakeholder* hanya pada bagian tertentu saja dan seringkali malah merugikan masyarakat sebagai pemilik usaha kecil. Hal ini diakibatkan karena pola interaksi yang selama ini dibangun dalam mengembangkan masyarakat atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat masih berdasarkan keuntungan dan kerugian yang didapat dari masing-masing *stakeholder*. Pemerintah masih seringkali mendahulukan kepentingan pihak-pihak pemilik modal di daerah yang bertujuan untuk menanamkan modal mereka sebagai bentuk pembangunan daerah padahal

pembangunan yang terjadi seringkali masih merugikan masyarakat dan kurang menciptakan sebuah lapangan kerja baru untuk menyerap tenaga kerja di daerah.

Dilain pihak, pemilik modal atau pihak swasta masih seringkali memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk melakukan pengusuran lahan atau pemanfaatan lahan untuk usaha mereka, yang dimana pemanfaatan ini hanya mendatangkan keuntungan bagi segelintir pihak saja dan akan merugikan sebagian besar masyarakat yang ada. Masyarakat sebagai subjek dari pengembangan pembangunan semestinya merupakan pihak pertama yang merasakan perubahan atas pembangunan ekonomi yang ada, baik dalam sektor formal maupun informal tetapi pada kenyataannya masyarakat yang bergerak dalam sektor informal atau UMKM selalu menjadi kambing hitam atas pembangunan ekonomi yang ada yang berujung pada semakin menurunnya tingkat produktivitas mereka.

Kebijakan pemerintah yang diharapkan akan menciptakan sebuah iklim yang baik bagi masyarakat kecil malah menjadi sebuah batu sandungan bagi mereka. Sejumlah daerah memiliki berbagai peraturan-peraturan yang menghambat berkembangnya sektor UMKM ini walau pada dasarnya pemerintah juga berupaya untuk melakukan pelayanan yang maksimal terhadap UMKM melalui pelayanan satu atap pajak ringan dan sebagainya. tetapi hal-hal tersebut tidak didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk perkembangan UMKM itu sendiri.

Salah satu kota yang mengalami hal ini adalah Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Malang memiliki tempat yang cukup strategis

terletak di dataran tinggi. Kota Malang memiliki potensi dalam hal pendidikan yang lebih baik, peluang kerja yang lebih besar, serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Jumlah penduduk Kota Malang dilihat sebagai peluang pemerintah Kota Malang untuk melakukan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi dengan kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta dimaksudkan agar pembangunan ekonomi berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat yang terus bertambah.

Untuk tetap mendukung program pemerintah mengenai peningkatan usaha mikro kecil dan menengah maka pemerintah mulai mengelola dan mengembangkan Pasar Wisata Belanja Tugu atau lebih sering disebut dengan pasar minggu, pasar ini merupakan tempat berkumpulnya berbagai pedagang kecil dari berbagai wilayah Kota Malang. Sebenarnya pasar wisata ini telah ada sejak tanggal 26 oktober 2008 tetapi belum menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Malang saat itu. Dengan dukungan pemerintah terhadap usaha mikro kecil dan menengah melalui pasar wisata belanja tugu menciptakan animo masyarakat yang baik dan terlihat dari jumlah pedagang yang bergabung dalam Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tugu (IPWBT) mencapai hampir 2000 pedagang.

Dalam perkembangannya pasar ini dapat meraup omset 800 juta dalam sehari. Tak heran pasar ini menciptakan gairah baru bagi masyarakat Kota Malang untuk ikut berjualan di pasar tersebut. Tetapi seiring dengan kontrak yang disepakati pemerintah dan pihak swasta sebagai investor di daerah Kota Malang, kebijakan terhadap Pasar Wisata Belanja Tugu (PWBT) menjadi semakin tidak menentu dan cenderung merugikan pedagang saat itu bahkan fenomena ini

berlangsung hingga sekarang tidak adanya kepastian dari pemerintah terhadap kebijakan PWBT. Ketidakpastian kebijakan pemerintah mengenai penataan dan pengelolaan PWBT, dapat dilihat dari 4 kali relokasi yang dilakukan pemerintah tanpa melalui mediasi dan peraturan yang jelas hanya berdasarkan kebutuhan pemerintah saat itu dan melihat peluang yang lebih besar dari PWBT.

Sebagai contoh relokasi pertama yang dilakukan pemerintah adalah memindahkan PWBT dari area luar stadion Gajayana Kota Malang menuju ke simpang balapan, pemindahan ini tidak lain karena pemerintah diindikasikan telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan pembangunan Mall Olympic Garden (MOG). Kemudian relokasi kedua dilakukan dari simpang balapan menuju lapangan rampal kota malang. Relokasi yang kedua ini karena jumlah pedagang yang cukup banyak dan mengganggu aktifitas warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kemudian relokasi ketiga dilakukan dari lapangan rampal menuju jalan semeru kota malang dan terakhir relokasi yang dilakukan dari jalan semeru menuju bagian luar stadion gajayana atau kembali ke tempat semula.

Selama proses relokasi tersebut para pedagang tidak mendapatkan kepastian dari pemerintah terhadap nasib mereka. Pemerintah hanya cenderung melakukan relokasi tanpa mempertimbangkan dampak dari relokasi dan kondisi dari daerah tempat relokasi sendiri. Dampak relokasi ini sempat mempengaruhi tingkat omset dari PWBT yang menurut hingga 300 juta perhari karena sulitnya akses jalan ke tempat tersebut dan keengganan masyarakat untuk menuju tempat tersebut. Hal ini tak layak menimbulkan rasa geram di masyarakat dan melalui

IPWBT masyarakat lebih sering untuk menolak relokasi yang dilakukan pemerintah mulai saat itu karena akan berakibat buruk terhadap kondisi pedagang dan pendapatan mereka. Selain itu pertumbuhan jumlah pedagang semenjak relokasi terakhir sangat pesat hingga banyak sekali pedagang ilegal yang tidak terdaftar dalam IPWBT. Maka tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi PWBT sekarang sangat rewet dan semrawut. “ Tidak hanya pengunjung yang mengeluhkan kondisi semrawut ini. Para pedagang dari IPWBT yang kini menempati lokasi baru juga mengeluhkan kondisi ini.” (Adhi, 2014).

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan yang selama ini terjadi di Kota Malang masih sering kali berpihak kepada pemilik modal atau swasta sebagai bentuk dari kontrak kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Banyaknya kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat kecil dan berimbas kepada perekonomian mikro berbasis usaha kecil dan menengah, sering kali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan tujuan dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat sebagai korban dari kebijakan pemerintah mau tidak mau harus berusaha keras untuk meningkatkan taraf hidup yang semestinya dapat diwujudkan dengan pembangunan. Oleh karena itu, penulis ingin membahas penelitian yang berjudul Interaksi Antar Aktor Dalam Kebijakan Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Di Kota Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi yang telah dijelaskan di latar belakang, maka rumusan masalah yang ingin dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan pemerintah Kota Malang mengenai pasar wisata belanja tugu Kota Malang ?
2. Bagaimanakah interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis kebijakan pemerintah Kota Malang mengenai pasar wisata belanja tugu Kota Malang
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pola interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang.

D. Kontribusi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademis

1. Aspek praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

baik bagi pemerintah sebagai pemegang kewenangan, swasta sebagai rekan kerja pemerintah dalam melakukan pengembangan pembangunan kota, maupun masyarakat sebagai pengawas dan obyek pembangunan itu sendiri agar esensi pembangunan dan pengembangan kota yang diharapkan dapat terwujud tidak saja memberikan keuntungan bagi pihak tertentu tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis usaha mikro kecil dan menengah.

2. Aspek akademis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang.
- b. Memberikan kontribusi gambaran kebijakan pemerintah mengenai penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang agar dapat digunakan sebagai informasi bagi pembaca maupun para praktisi akademik khususnya.
- c. Sebagai referensi pengembangan ilmu dan teori yang berkaitan dengan administrasi publik.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menelusuri alur pikir dan pembahasan dalam skripsi ini, maka sangat perlu untuk menentukan kerangka pemikiran. Karena melalui kerangka pemikiran ini akan diperoleh deskripsi umum mengenai garis besar isi dan pemikiran yang terkandung didalamnya, serta akan lebih memudahkan didalam memahami maksud dari penulisan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran

dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai pola interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang, penulis juga memberikan tujuan dan kontribusi yang ingin dicapai melalui penulisan penelitian ini, dan diakhir penulis memberikan kerangka pemikiran sebagai deskripsi singkat sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mengemukakan teori-teori atau temuan-temuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian mengenai pola interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi ini dilakukan dan berisikan tentang metode yang akan digunakan dalam meneliti, fokus penelitian, lokasi, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Data yang telah ada kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dan berisikan saran yang ingin disampaikan penulis yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebuah negara dikatakan sebagai negara jika mereka memiliki kedaulatan, wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Hal ini biasanya masih ditambahkan dengan pengakuan dari pihak internasional yang terwakilkan oleh PBB. Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat yang mendiami sebuah negara akan hidup bersama dalam sebuah wilayah tertentu dan dibawah sebuah pemerintahan yang berdaulat baik secara *intern* maupun *ekstern*. Kehidupan bersama antar masyarakat acap kali diwarnai berbagai perbedaan karena mereka memang berasal dari berbagai suku dan bangsa, untuk itu negara tidak hanya berperan sebagai wadah atau status saja tetapi negara perlu juga memahami pentingnya sebuah negara bagi masyarakat.

Ada tiga hal yang berkenaan dengan hal tersebut yaitu :

- a. Berkenaan dengan siapa saja dan apa saja yang tinggal di negara tersebut,
- b. Berkenaan dengan siapa saja dan apa saja yang menjadi bagian dari negara tersebut baik ketika di dalam negara tersebut maupun diluarnya,
- c. Berkenaan dengan siapa saja dan apa saja yang berhubungan dengan negara dan warga negara tersebut (Nugroho, 2012 : 117-118).

Dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwa sebuah negara membutuhkan sebuah instrument untuk mengatur keberlangsungan kehidupan didalamnya. Jadi negara berfungsi sebagai sebuah wadah yang mengatur seluruh

kehidupan didalamnya termasuk ketika warga negara berada di luar teritorial wilayah, negara tetap bertugas untuk melindungi dan memastikan bahwa segala sesuatu yang terkait dengan negaranya tidak disalah gunakan. Instrumen ini dapat berupa peraturan, atau lebih sederhananya dalam sebuah negara disebut kebijakan publik. Karena merupakan sebuah aturan maka kebijakan publik merupakan sebuah hukum juga yang mengatur dan mengikat setiap warga negara atau pendatang tanpa terkecuali.

Untuk lebih memperjelas mengenai kebijakan publik Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Nugroho (2012 : 71) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Sebuah program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, praktik-praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*)”. Sedangkan Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2012 : 119) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai “Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada”. Dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun kelompok tertentu yang menghendaki tercapainya sebuah tujuan tertentu dengan segala resiko yang ada.

Secara garis besar bila kebijakan publik dikaitkan dengan keberlangsungan sebuah negara maka kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai sebuah strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. “Kebijakan publik adalah sebuah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat

yang dicita-citakan” (Nugroho, 2012 : 123).

Gambar 1. Kebijakan Publik Ideal (Nugroho, 2012 : 123)

2. Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Sebagai sebuah instrumen kebijakan publik merupakan sebuah alat yang mampu untuk merubah situasi dan kondisi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi secara serentak akan diikuti oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai obyek utama dari kebijakan tersebut. Karena bersifat mengikat dan harus dipatuhi maka sebuah kebijakan publik harus memiliki sebuah bentuk yang dapat dipakai sebagai acuan bagu bila mana sebuah kebijakan diragukan keberadaannya. Untuk itu kebijakan publik dibentuk berdasarkan tingkatan dan fungsi dari kebijakan itu sendiri.

Di negara berkembang seperti Indonesia kebijakan publik di bentuk berdasarkan tingkatan daerah yang diatur sesuai dengan otonomi daerah. Tingkatan kebijakan diatur mulai dari tingkat tertinggi yaitu Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga tingkat terendah yaitu peraturan daerah Kabupaten/Kota. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Dengan terciptanya sinergitas ini maka program-program yang ingin dicapai melalui sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berbeda halnya dengan kondisi negara maju yang tergolong dalam negara kontinentalis. Kebijakan publik dibedakan atas dasar tingkatan urgensi atau universal kepentingan sebuah kebijakan, walau sebenarnya pembagian ini tidak jauh berbeda dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi di sisi pembagian ini lebih merujuk kepada spesifik instansi atau tingkat hierarki dari sebuah birokrasi dalam membentuk sebuah kebijakan. Adapun pengelompokan menurut paham kontinentalis, yaitu :

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar.
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Kebijakannya dapat berbentuk pula surat keputusan bersama atau SKN antar-menteri, gubernur, bupati, atau wali kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota (Nugroho, 2012 : 131).

Dalam pelaksanaannya di negara-negara maju kebijakan yang bersifat *makro* maupun *meso* sering kali diikuti dengan implementasi secara langsung. Hal ini bukan berarti bahwa kebijakan di tingkat tersebut tidak membutuhkan peraturan pelaksanaan tetapi lebih kepada tingkat efisiensi yang ingin dicapai

melalui kebijakan tersebut. Kita ketahui bahwa kebijakan di tingkat *makro* maupun *meso* tergolong dalam *high cost* sehingga membutuhkan banyak dana untuk merumuskannya saja bila hal ini ditambah dengan peraturan pelaksana maka dana yang akan dibutuhkan untuk sekedar merumuskan sebuah kebijakan semakin besar.

3. Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan tidak begitu saja lahir, tetapi melalui sebuah proses atau tahapan yang cukup panjang untuk mencapai sebuah kebijakan yang baik. Adapun proses atau tahapan dari kebijakan publik menurut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Widodo (2012 : 16) meliputi :

- a. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)
Identifikasi masalah dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda (*agenda setting*)
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*)
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Proses-proses tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya dan dapat bekerja tidak berdasarkan urutan, tetapi tidak dapat sebuah kebijakan terlepas atau melewati proses yang ada. Keterkaitan ini menciptakan sebuah alur bagaimana sebuah masalah akan diselesaikan melalui sebuah kebijakan publik. Hal ini sangat penting mengingat tidak semua isu atau masalah yang terjadi di masyarakat akan diselesaikan melalui kebijakan publik dapat diselesaikan melalui cara lain diluar kebijakan atau dapat menggunakan kebijakan yang telah ada untuk mengkaji masalah tersebut. Sedangkan isu atau masalah yang menjadi pusat perhatian atau memiliki tingkat urgensi tinggi nantinya akan mendapat perhatian utama dalam alur perumusan tersebut. Adapun penjelasan mengenai alur tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

- a. Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu kebijakan terdiri dari dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya kebijakan publik dapat berorientasi terhadap permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Pada saat itu, sebagian kebijakan publik mengacu pada permasalahan daripada antisipasi kedepan, dalam bentuk *goal oriented policy*, sehingga dalam banyak hal kita melihat kebijakan publik yang berjalan tertatih-tatih di belakang masalah publik yang terus bermunculan dan akhirnya semakin tak tertangani.
- b. Isu kebijakan ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka untuk menyelesaikan masalah tersebut. rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya, termasuk pimpinan negara.
- c. Setelah dirumuskan, kebijakan publik ini kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat mapun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d. Namun dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar serta diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

- e. Implementasi kebijakanbermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- f. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk dampak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. (Nugroho, 2012 : 149).

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan hal yang sangat krusial dalam proses kebijakan publik. Hal ini dikarenakan dalam proses implementasi akan terkait dengan berbagai faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan pencapaian dari sebuah kebijakan publik. Implementasi yang baik akan mampu merefleksikan tujuan yang ingin dicapai melalui proses kebijakan publik, sebaliknya implementasi yang kurang baik tidak dapat merefleksikan tujuan yang ingin dicapai tersebut walau dalam proses pelaksanaannya dapat dikatakan berhasil.

Banyak sekali kebijakan publik yang gagal untuk mewujudkan tujuan awal dikarenakan implementasi yang kurang memadai dan pengaruh dari berbagai faktor yang merubah cara dan esensi dari implementasi kebijakan itu sendiri. Untuk itu perlu diketahui makna sebenarnya dari implementasi kebijakan publik, agar memberikan gambaran yang jelas mengenai esensi, tujuan, dan inti dari implementasi itu sendiri. Kamus Webster yang dikutip Wahab (2002 : 50)

mengartikan implementasi sebagai “*to provide the means for carrying out, to give practical effect to*”. Dimana implementasi merupakan penyediaan sarana untuk membentuk sebuah kebijakan yang akan memberikan dampak terhadap sesuatu tertentu.

Donald S. Van Mater dan Carl E. Va yang dikutip Widodo (2012 : 86) menguraikan implementasi sebagai “*policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. This include both one time efforts to transform decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions*”. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individual (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat tindakan-tindakan ini, berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang dimanakan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Jadi implementasi kebijakan adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta yang terkait dengan proses kebijakan, yang ingin merubah keputusan-keputusan dalam sebuah proses kebijakan menjadi tindakan operasional yang mampu untuk memberikan dampak serta perubahan-perubahan baik besar maupun kecil sesuai dengan amanat dari keputusan-keputusan dalam proses kebijakan publik.

Implementasi sebagai tindakan operasional memiliki tahapan-tahapan sebagai bentuk persiapan dalam menginterpretasikan sebuah keputusan kedalam tindakan yang riil dan dapat diterima. Hal ini penting dilakukan karena akan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dalam mencapai tujuannya, semakin detail sebuah implementasi dalam menginterpretasikan sebuah keputusan maka akan semakin baik pula proses yang terjadi di lapangan. Setidaknya ada tiga

tahapan oprasional dalam proses implementasi, yaitu :

- a. Tahap interpretasi (*Interpretation*)
Tahap intrepretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam sebuah kebijakan yang lebih bersifat teknis oprasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*strategic policy*) akan dijabarkan kedalam kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan dalam kebijakan teknis oprasional (*operational policy*)
- b. Tahap pengorganisasian (*to Organized*)
Tahap pengorganisasian ini lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya; penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakannya, dan mempertanggungjawabkan); penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuki melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (jungklak dan juknis); dan penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan termasuk penetapan pola kepemimpinan dan kordinasi pelaksanaan kebijakan.
- c. Tahap aplikasi (*application*)
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah ada. (Widodo, 2012 : 90-94)

2. Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

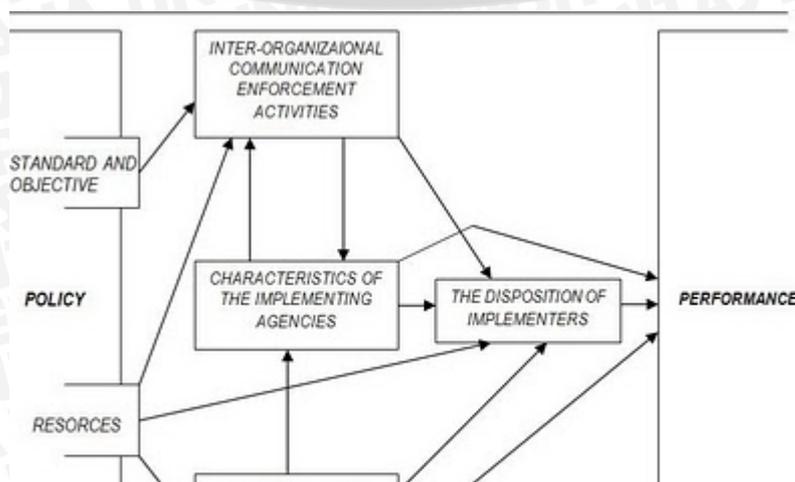
Penentuan sebuah model kebijakan sangat dibutuhkan. Model ini nantinya merupakan sebuah kerangka dimana sebuah kebijakan akan direalisasikan menjadi sebuah program yang jelas yang memberikan dampak. Sebuah model implementasi juga meningkatkan besarnya prosentase keberhasilan sebuah kebijakan publik, pada dasarnya sebuah rancangan kebijakan hanya berisi 20% dari tingkat keberhasilan sedangkan implementasi menentukan setidaknya 60% dari tingkat keberhasilan dan sisahnya sekitar 20% merupakan cara bagaimana kita untuk mengendalikan implementasi tersebut.

Sumber : Nugroho, 2012 : 682

Perkembangan model implementasi sebenarnya telah ada sejak tahun 1970-an dimana model yang ada masih menganut implementasi sebagai sebuah studi yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan kebijakan dengan eksekusinya. Seiring dengan berkembangnya waktu sebuah implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang memiliki tingkat rasionalitas yang cukup baik untuk mengaplikasikan sebuah keputusan kebijakan kedalam sebuah program dan tindakan yang memiliki dampak. Adapun model implementasi yang dimaksud adalah :

a. Model Van Mater dan Van Horn

Gambar 3. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn

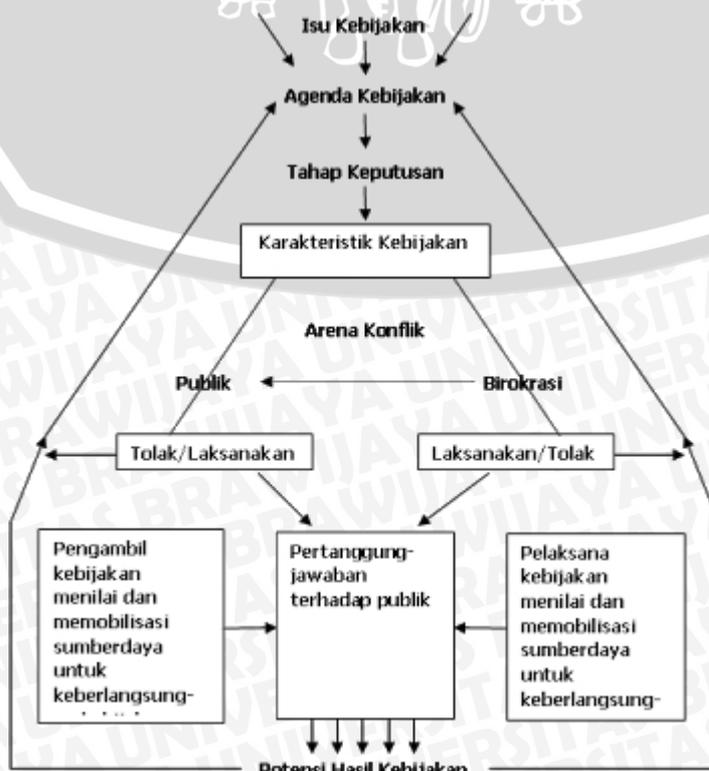


Sumber : Nugroho, 2012 : 684

Model implementasi ini mencoba menjelaskan bahwa sebuah implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang ingin mencapai sebuah tingkat kinerja implementasi yang tinggi melalui berbagai variable yang terkait. Model ini mengandaikan bahwa sebuah implementasi akan berjalan linear dengan variabel-variabelnya seperti kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik.

b. Model Grindle

Gambar 4. Model Grindle



Sumber : Nugroho, 2012 : 682

Dalam model ini sebuah implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Idenya adalah melakukan sebuah implementasi kebijakan melalui transformasi dari proses perumusan kebijakan dan tingkat keberhasilan atau kinerjanya bergantung kepada isi dari kebijakan tersebut. tetapi pada dasarnya model ini sangat berbeda dengan model linier yang bergantung kepada variabel-variabel yang searah. Model ini lebih dinamis dan mengharapkan setiap *stakeholder* memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan (Riant Nugroho, 2012).

c. Model Edward III

Model Edward III mengacu pada variabel yang mungkin dapat mempengaruhi berlangsungnya sebuah implementasi. Variabel-variabel ini saling terkait untuk menciptakan sebuah perubahan terhadap berlangsungnya sebuah kebijakan. Di satu sisi variabel juga dapat berperan sebagai pendukung keberhasilan dari kinerja sebuah implementasi, hal ini disebabkan oleh perubahan dan interaksi yang terjadi selama proses implementasi berlangsung. Variabel yang dimaksudkan menurut Edward III yang dikutip Widodo (2012 : 96) yaitu :

1. Faktor komunikasi

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2. Sumber daya (*Resources*)

Edward III dalam Widodo (2012 : 98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya ini juga memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menjelaskan bahwa “ bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

Edward III dalam Widodo (2012 : 104) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementors*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.

Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan (*coognitive*) dan mereka sangat mendalami dan memahaminya (*comprehension and understanding*).

4. Struktur birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya. Namun menurut Edward III dalam Joko Widodo (2012 : 106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ada ketodak efisiensi struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Oleh karena itu struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi

(*standard operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan para pelaku kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. (Widodo, 2012 : 97-106)

3. Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Publik

Interaksi aktor-aktor, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah, menimbulkan adanya dinamika politik yang menyertai proses implementasi. Pelaksana kebijakan selalu senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah-sebagai agen eksekutif. Namun dalam pelaksanaannya, kita dapat melihat bahwa ada empat aktor implementasi yang berperan, yaitu :

- a. Pemerintah. Meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan *eksistensi* negar bangsa. Kebijakan disini disebut sebagai *existensial driven policy*. Pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya, meskipun masyarakat dilibatkan, perannya seringkali dikategorikan sebagai *periferal*.
- b. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Disini termasuk pelayanan KTP dan kartu keluarga yang melibatkan jaringan kerja non-pemerintah di tingkat masyarakat.
- c. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *societal driven policy*. Di sini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah. Termasuk diantaranya panti-panti sosial, yayasan kesenian, hingga sekolah-sekolah non-pemerintah.
- d. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people (atau private) driven policy*. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.(Nugroho, 2012 : 688)

Pemilahan ini tidak seekstrem yang digambarkan, karena pada dasarnya implementasi sebuah kebijakan dijalankan senantiasa bersama-sama antara dua aktor atau lebih. Hubungan antar aktor yang erat menciptakan bahwa sebuah

kebijakan yang digulirkan merupakan pencapaian dari tujuan bersama yang ingin dicapai untuk menyelesaikan sebuah permasalahan publik. Aktor yang berperan dalam setiap kebijakan publik akan memberikan peran sertanya dalam setiap kegiatan atau program implementasi, bila hal ini tidak berjalan atau hanya ada satu aktor saja yang mendominasi setiap implementasi kebijakan maka akan tercipta ketidakseimbangan dan berakibat terhadap kesalahan persepsi antar aktor yang berujung kepada kegagalan sebuah implementasi kebijakan publik.

C. *Stakeholder*

1. Definisi *Stakeholder*

Stakeholder dapat didefinisikan sebagai orang-orang, kelompok-kelompok di dalam atau diluar suatu organisasi (Boonstra, 2006 : 40). Sedangkan Freeman dalam Akmal (2006 : 169) mendefinisikan *stakeholder* sebagai “*any group or individual who can affected by the achievement of organizations objectives*” (setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian prestasi dari sasaran organisasi). Jadi pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah pihak-pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengambilan sebuah keputusan. Mereka bertindak berdasarkan keinginan, tujuan dan kekuasaan yang dimiliki untuk merubah sebuah arah atau pandangan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Untuk menciptakan hal tersebut para pemangku kepentingan (*stakeholder*) membutuhkan sebuah komitmen yang baik. Voge (2009 : 1) mengatakan bahwa pentingnya komitmen bagi pemangku kepentingan sebagai berikut, “*Commitment is important in any relationship. It is the value that galvanizes diverse entities so that all can work together unilaterally and seamlessly. Without it, there is no bond and no common purpose*” (komitmen merupakan hal yang penting di setiap hubungan. Komitmen adalah nilai yang menyatukan unsur-unsur berbeda sehingga semua dapat bekerja sama dalam sebuah kesatuan dan tanpa ikatan).

2. Identifikasi *Stakeholder*

Identifikasi *stakeholder* merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan untuk melihat keterkaitan berbagai pihak dalam sebuah kebijakan publik. Hal ini penting karena dalam sebuah kebijakan pihak-pihak yang terkait akan menentukan sebuah pola hubungan dan kualitas dari kebijakan itu sendiri. Identifikasi ini juga berfungsi untuk melihat sejauhmana peran dan kinerja mereka dalam sebuah kebijakan, tentu saja hal ini akan berkaitan dengan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan dan pengelolaan kebijakan selanjutnya. Secara umum kinerja dan peran pemangku kepentingan yang maksimal akan menghasilkan sebuah kebijakan yang memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi, bahkan disatu sisi akan menghasilkan sebuah potensi baru untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam isu dan agenda kebijakan selanjutnya.

Secara garis besar, para pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan

menjadi tiga kategori (Crosby, 1992 dikutip oleh Iqbal, 2007 : 90) yaitu :

- a. Pemangku kepentingan utama (*primary stakeholder*), merupakan kelompok sosial masyarakat yang terkena dampak baik secara positif maupun negatif dari setiap kebijakan atau kegiatan yang ada.
- b. Pemangku kepentingan penunjang (*secondary stakeholder*), merupakan perantara dalam proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan ini terdiri dari penyandang dana, pelaksana kegiatan, organisasi pengawas dan advokasi, atau secara umum digambarkan antara lain pemerintah, lembaga sosial masyarakat (LSM), pihak swasta, politisi, tokoh masyarakat. Pemangku kepentingan penunjang ini juga berperan sebagai pemangku kepentingan kunci.
- c. Pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*) yang secara signifikan memiliki pengaruh dan kepentingan dalam sebuah kegiatan.

Stakeholder kunci merupakan mereka yang dengan mantap dapat mempengaruhi dalam sebuah proyek. Pengaruh merupakan sebuah kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang dapat merubah sebuah implementasi dan tujuan dari sebuah kebijakan yang ada.

Keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan bergantung kepada masing-masing tujuan dan kepentingan dari *stakeholder* dimana masing-masing *stakeholder* memiliki fungsi dari kekuasaan, legitimasi, dan urgensi sehingga potensi dan masukan dari masing-masing pihak dapat dengan baik dijalankan dalam sebuah proyek atau kebijakan (Abdulkarim, 2007).

- a. Power, *stakeholder* memiliki kewenangan yang memaksa atas dasar pemahamannya, yang bermanfaat, atau berdasarkan norma, dalam usaha untuk mempengaruhi baik kelompok maupun perorangan berdasarkan keinginannya.
- b. Legitimasi, *stakeholder* mempunyai legitimasi ketika sebuah tindakan dalam organisasi dilihat sebagai keinginan secara luas, yang sesuai atau yang tepat dengan norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan dari masyarakat yang lebih besar. Legitimasi pada dasarnya merupakan sebuah asumsi atau persepsi terhadap keinginan sebagaimana besar orang, yang sesuai dengan sistem dan norma-norma terkait, dengan kepercayaan-kepercayaan dan definisi-definisi.
- c. Urgensi, urgensi ada ketika sebuah hubungan antar pemangku kepentingan mendapatkan kritik yang menciptakan sebuah problema baru dan membutuhkan sebuah penyelesaian masalah.

Boonstra (2006 : 40) mengemukakan bahwa dengan mengkombinasikan tiga fungsi yang dimiliki oleh *stakeholder* akan menghasilkan 8 jenis *stakeholder* yang memiliki berbagai peran dan kepentingan. Adapun delapan *stakeholder* tersebut adalah :

- a. *Dormant stakeholder (power, no legitimacy and no urgency)* adalah pemangku kepentingan yang memiliki fungsi kekuasaan tetapi tidak memiliki fungsi legitimasi dan urgensi.
- b. *Discretionary stakeholder (legitimacy, but no power and no urgency)*

adalah pemangku kepentingan yang memiliki fungsi legitimasi tetapi tidak memiliki fungsi kekuasaan dan urgensi.

c. *Demanding stakeholder (urgency, but no power and no legitimacy)*

adalah pemangku kepentingan yang memiliki fungsi urgensi tetapi tidak memiliki fungsi kekuasaan dan legitimasi.

d. *Dominant stakeholder (power and legitimacy, but no urgency)* adalah

pemangku kepentingan yang memiliki fungsi kekuasaan dan legitimasi tetapi tidak memiliki fungsi urgensi.

e. *Dangerous stakeholder (power and urgency, but no legitimacy)* adalah

pemangku kepentingan yang memiliki fungsi kekuasaan dan urgensi tetapi tidak memiliki fungsi legitimasi.

f. *Dependant stakeholder (legitimacy and urgency, but no power)* adalah

pemangku kepentingan yang memiliki fungsi legitimasi dan urgensi tetapi tidak memiliki fungsi kekuasaan.

g. *Definitive stakeholder (power, legitimacy, and urgency)* adalah

pemangku kepentingan yang memiliki fungsi baik kekuasaan, legitimasi, maupun urgensi.

h. *Nonstakeholders (no power, no legitimacy, and no urgency)* adalah

pemangku kepentingan yang tidak memiliki fungsi kekuasaan, legitimasi maupun urgensi.

3. Analisis Stakeholder

Menurut Grimble yang dikutip Abdulkarim (2007 : 10), analisis

stakeholder adalah “Identifikasi terhadap *stakeholder* sebuah proyek, suatu penilaian terhadap minat dan cara mereka dimana minat ini berpengaruh terhadap resiko dan tingkat kebenaran dari proyek yang dikerjakan, dan dipergunakan untuk mengevaluasi perkembangan kapasitas *stakeholder* tersebut”. Analisis *stakeholder* membantu untuk menilai sebuah faktor eksternal atau lingkungan yang berpengaruh terhadap proyek, menarik keluar sebuah minat *stakeholder* terhadap permasalahan yang ada yang terkait dengan konflik kepentingan antar *stakeholder*. Salam dan Noguchi yang dikutip Abdulkarim (2007 : 54) menyarankan pemakaian 4R dalam melakukan analisis *stakeholder*, yaitu “*right* (hak), *responsibilities* (tanggung jawab), *revenue* (pendapatan), dan *relationships* (hubungan)”. Konsep ini tidak lain untuk menunjukkan sebuah pola hubungan dan interaksi yang terjadi antar *stakeholder*.

4. Interaksi Antar Stakeholder

Dalam pelaksanaan sebuah program khususnya sebuah kebijakan pasti akan terdapat banyak aktor dan organisasi yang terlibat didalamnya. Dalam implementasinya yang menggunakan konsep multidimensi dan organisasi akan menimbulkan konsekuensi antar organisasi yang membutuhkan kordinasi dan interaksi didalamnya atau dengan kata dibutuhkan kerjasama antar aktor untuk menciptakan sebuah sinergitas yang baik. Agar sebuah proses kerjasama yang dilakukan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan tiga faktor utama yang mendukung kerjasama yang ada yaitu : *authority*, *common interest* dan *exchange*. Ketiga hal tersebut dibutuhkan untuk membuat sebuah jembatan penghubung

antar dinas atau pemangku kepentingan dalam menjalankan setiap kegiatannya. Meskipun ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendukung dalam terciptanya sebuah kerjasama yang baik tetapi perlu diingat bahwa tingkat keberhasilan kerjasama atau interaksi antar aktor akan berbanding terbalik dengan jumlah unit yang bekerjasama dalam sebuah kegiatan. Jenning (1998 : 418) mengatakan bahwa “Sebuah koordinasi akan semakin menjadi lebih sulit ketika unit kerja yang terlibat dalam implementasi sebuah program semakin banyak.”

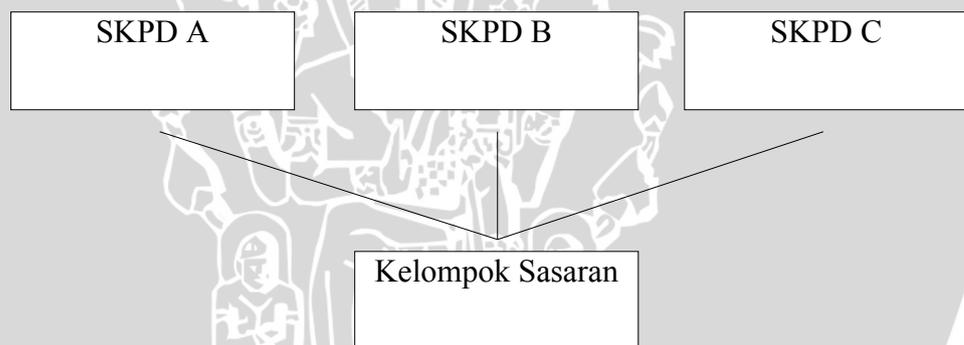
Menurut Purwanto (2012 : 153), “agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka seluruh *stakeholder*, terutama penanggung jawab implementasi, perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi”. Setidaknya ada empat mekanisme kerja atau pola hubungan interaksi antar *stakeholder* yang terlibat dalam sebuah implementasi kebijakan (Purwanto, 2012 : 155-159) yaitu :

a. Mekanisme kerja mengutub (*pooled*)

Proses implementasi sebuah kebijakan menggunakan pola mengutub bila mana suatu kebijakan dalam proses implementasinya melibatkan banyak sekali organisasi atau aktor untuk melaksanakan (kementerian, dinas, badan, lembaga) dengan satu kelompok sasaran tertentu. Meskipun dalam penerapannya melibatkan banyak lembaga atau aktor tetapi dalam pelaksanaannya masing-masing *stakeholder* tidak saling bergantung satu dengan yang lainnya, masing-masing memiliki peran dan keluaran-keluaran kebijakan untuk kelompok sasaran yang sama. Karena tidak saling terkait maka pola hubungan seperti ini

membutuhkan koordinasi atau interaksi yang minimal antar aktor. Bentuk kerjamasa atau koordinasi yang dilakukan hanya sebatas pembagian kerja yang jelas antar aktor sejak awal dimulainya implementasi kebijakan. Setelah pembagian dilakukan maka masing-masing aktor dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing aktor. Pola hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5. *Tipe Pooled*



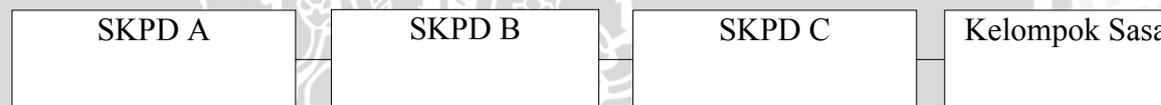
Sumber : Purwanto (2012 : 156)

b. Mekanisme kerja berkaitan (*sequential*)

Proses implementasi sebuah kebijakan menggunakan pola kerja berkaitan bilamana sebuah implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya dan memiliki kelompok sasaran tertentu. Dalam prosesnya terdapat hubungan saling ketergantungan antar masing-masing aktor dalam menjalankan tugas dan kepentingan masing-masing. Pola yang terbentuk dalam mekanisme kerja ini adalah

input-output dimana *output* yang dihasilkan oleh organisasi atau aktor pertama akan menjadi *input* bagi organisasi atau aktor kedua dan begitu seterusnya. Tingkat keberhasilan dari mekanisme implementasi ini sangat bergantung kepada kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor selain itu juga dipengaruhi oleh hasil kinerja yang menentukan *input* bagi aktor yang lain.

Gambar 6. *Tipe Sequential*

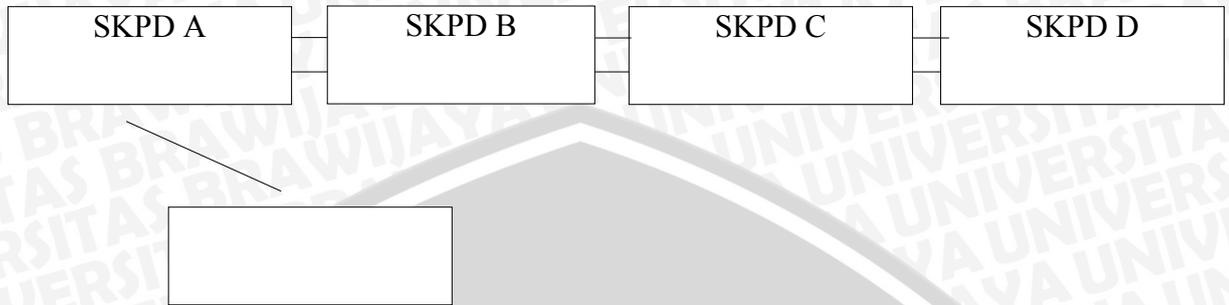


Sumber : Purwanto (2012 : 157)

c. Mekanisme kerja timbal balik (*reciprocal*)

Proses implementasi kebijakan menggunakan mekanisme kerja timbal balik bilamana sebuah implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya dan menyerahkan kelompok sasaran kepada satu aktor pada saat eksekusi terakhir dari sebuah kebijakan. Pola interaksi yang terjadi dalam mekanisme ini adalah masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi akan menghasilkan *output* yang nantinya akan menjadi *input* kepada aktor lainnya. Pola hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 7. Tipe Resiprocal



Sumber : Purwanto (2012 : 158)

d. Mekanisme kerja *single agency*

Mekanisme kerja ini terjadi pada organisasi yang bersifat tunggal. Tidak ada pola yang spesifik mengenai interaksi atau kinerja yang dilakukan semua diolah oleh satu organisasi atau aktor yang kemudian juga akan berperan dalam proses implementasi kebijakan yang ada. Input dan output yang dihasilkan berasal dari proses identifikasi yang dilakukan terhadap kelompok sasaran.

D. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Pemberdayaan

Konsep pembangunan yang terpusat pada manusia atau menjadikan manusia sebagai objek utama dalam pembangunan merupakan cikalbakal timbulnya strategi pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan merupakan

salahsatu strategi dalam pembangunan yang kemudian diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan, terutama hal ini terjadi di negara-negara berkembang.

Berdasarkan asal katanya pemberdayaan dan memberdayakan, berasal dari kata *empowerment* dan *empower*. Pengertian pertama mengandung makna yaitu memberikan kuasa, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan pengertian yang kedua mengandung makna memberikan kemampuan atau keberdayaan atau *empowerment*. Jadi bila di asumsikan masyarakat memiliki potensi dari dalam diri mereka maka pemberdayaan lebih kepada memberikan kekuasaan yang ada agar dikelola oleh masyarakat sedangkan memberdayakan lebih kepada meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mampu mengelola potensi baik yang dimiliki atau sebagai peluang yang bermanfaat.

Ujianto Singgih Prayitno yang dikutip Suryanto (2008 : 112), mengatakan bahwa “ Konsep pemberdayaan harus dipandang sebagai proses kolektif, bukan semata-mata pemberdayaan individu”. Tetapi dalam praktik sekarang ini banyak sekali hak-hak individu menjadi tidak terpenuhi karena proses kolektif ini atau berlaku sebaliknya terlalu mengandalkan proses individu sehingga kolektif tidak dihargai. Untuk itu dalam perkembangan proses pemberdayaan, menciptakan sinkronisasi antara proses kolektif dan individual dengan cara membagi mereka dalam sistem kluster.

Sistem kluster tersebut akan menjadi jembatan dalam melakukan pemberdayaan. Setidaknya ada tiga faktor yang harus diperhatikan selama proses

pemberdayaan berlangsung yaitu :

- a. Upaya yang dilakukan harus terarah (*targeted*), secara umum disebut dengan pemihakan terhadap kelompok sasaran tertentu yang membutuhkan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalah dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Program yang ada harus melibatkan dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat sebagai objek sasaran pemberdayaan, hal ini dimaksudkan agar setiap program dari pemberdayaan sesuai tujuan dan kebutuhan dari masyarakat. Sekaligus upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan, perancangan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas perkembangan ekonomi.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, pendekatan ini berfungsi untuk memberikan solusi atas pemecahan masalah-masalah masyarakat yang terkait dengan masalah individu. Selain hal itu penanggulangan masalah secara individu dirasa masih sangat luas dan akan sulit untuk mendapatkan solusi pribadi (Kartasmita, 1996).

Pemberdayaan yang dilakukan haruslah ditujukan untuk meningkatkan potensi yang ada dalam masyarakat baik *intern* maupun *ekstern*, yang nantinya akan bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu diperlukan interaksi antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan perguruan tinggi dalam menciptakan sebuah iklim yang mampu untuk mendukung terciptanya sebuah kondisi yang mendukung berlangsungnya sebuah kegiatan

produksi, distribusi, dan konsumsi.

2. Strategi Pemberdayaan

Cornelis dan Miar (2005 : 82), mengatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan ekonomi rakyat terdapat dua strategi, yaitu :

Strategi pertama, adalah memberi peluang agar sektor dan masyarakat modern tetap dapat maju, dan kemajuannya dibutuhkan untuk pembangunan bangsa secara keseluruhan (dengan pendekatan deregulasi).

Strategi kedua, memberdayakan sektor ekonomi lapis masyarakat yang masih tertinggal dan hidup diluar atau di pinggiran jalur modern.

Memberdayakan (*empowerment*) adalah memampukan dan memandirikan lapisan masyarakat tersebut. hal ini dilakukan dengan cara :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat dapat berkembang, dengan melakukan dorongan, motivasi dan mambangkitkan upaya kesadaran dalam masyarakat terhadap potensi yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan sebagai sebuah usaha kemandirian.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, misalnya dengan membuka berbagai akses pelayanan dan jasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya yang dimiliki oleh mereka seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, transportasi, informasi, modal, dan lain sebagainya.

Aplikasi dari pembangunan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang memadukan paradigma pertumbuhan dan pemerataan dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan. Dalam kajian empiris pemberdayaan dan pemihakan terhadap masyarakat yang lemah dan kurang mampu dilihat sebagai sebuah tindakan untuk mencegah terjadinya sebuah persaingan yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Pemberdaayaan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya strategi yang mendukungnya menurut Charles Elliot dalam Priyono,et.al (1996:18), ada tiga pendekatan dalam melakukan pemberdayaan, yaitu :

a. *The welfare approach*

Pendekatan ini mengarahkan kepada pendekatan manusia dan bukan untuk memperdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat, tetapi justru untuk melakukan penguatan dalam pemberdayaan masyarakat.

b. *The development approach*

Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah pemberdayaan dalam masyarakat dimana pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan keswadayaan masyarakat.

c. *The empowerment approach*

Pendekatan yang melihat bahwa sebuah kemiskinan yang terjadi di masyarakat akibat dari proses politik yang rumit dan berusaha untuk mengatasi ketidak berdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai lokal

yang dianut oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini maka masyarakat ditempatkan sebagai subjek dari pembangunan dan bukan objek saja.

E. Ekonomi Politik

1. Pendekatan Klasik

Pendekatan klasik menyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dalam artian yang kuat (*strong sense*) dimana pandangan seperti ini dijadikan dasar untuk melaksanakan kebijakan *Laissez-faire* (dari bahasa Prancis “biar bekerja”) yang berarti perdagangan bebas. Argumen yang diajukan oleh pemikir aliran klasik ini adalah sistem pasar. Sistem Pasar sendiri adalah sebuah realitas yang sui generis (mampu menciptakan dirinya sendiri atau akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia) dimana pasar memiliki hubungan dengan negara tetapi pasar bukan organ bawahan dari negara.

Paham klasik melihat negara tidak boleh mencampuri urusan pasar. Negara bisa dianggap akan mengganggu jalannya pasar karena seringkali dominasi pemerintah hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja. Negara hanya berperan dalam melindungi masyarakatnya bila terjadinya konflik baik konflik internal maupun eksternal. Selain itu, negara berfungsi sebagai penyedia layanan baik itu infrastruktur, maupun sarana dan prasarana publik demi keberlangsungan mekanisme pasar didalam negara.

Dominasi politik yang semakin memudar dalam pendekatan ini tampak

jas dengan konsep *invisible hand* yang dikemukakan oleh Adam Smith, selanjutnya aliran klasik ini menurut Rachbini (2002:116) menyatakan bahwa pendekatan klasik dari ekonomi politik diuraikan menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Pertama mengenai pendapat yang menyatakan bahwa pasar yang mengatur dirinya sendiri, dalam bagian ini akan melihat mengenai sistem pasar dan hubungan antara pasar dan negara.
- b. Kedua mengenai distribusi dan nilai yang ada. Bagian ini akan melihat bagaimana distribusi pasar dan penyaluran surplus ekonomi yang terjadi antara pasar dan negara.

Sebuah pasar akan berjalan dengan baik jika individu- individu di dalamnya bertindak sebagai pembeli dan sekaligus penjual. Tiap-tiap pelaku dalam pasar bertindak sebagai penjual dan pembeli maka uang dan komoditas akan “berputar” (sirkulasi) di dalam pasar. Pasar berfungsi sebagai wadah untuk memfasilitasi pertukaran hak kepemilikan agar sesuai dengan keinginan dari para pemilik property yang menjadi pelaku pasar. Dengan kata lain, pasar adalah mekanisme sosial yang berfungsi untuk menjamin bahwa kebutuhan pribadi dapat dipenuhi.

Jika pendapatan didapatkan lewat pasar, maka penderitaan menjadi sebuah hal yang tidak terhindarkan. Tapi para pemikir ekonomi klasik tidak menganggap bahwa komoditas yang tidak laku adalah bukti dari kelemahan pasar. Yang dikatakan pemikir ekonomi klasik adalah bahwa penderitaan yang ditimbulkan pasar adalah penderitaan pada individu per individu. Maksudnya, pendapatan dan kesejahteraan dari seorang penjual tentu bisa saja menurun oleh karena kondisi pasar, tetapi pendapatan dan kesejahteraan dari semua penjual sebagai satu kesatuan tidak mungkin bisa mengalami kerugian. Para pemikir ekonomi klasik

menyatakan bahwa kesulitan yang dialami seorang penjual akan bersifat sementara karena kesulitan itu akan berakhir ketika si penjual itu menyesuaikan ketrampilannya dan modalnya sehingga ia menghasilkan barang lain yang disukai pasar.

Kegagalan pasar dalam pandangan aliran klasik adalah kapasitas produksi tidak terpakai karena tidak ada permintaan. Disisi lain ketidakadaan permintaan ini disebabkan karena kapasitas produksi yang tidak terpakai (sehingga orang tidak mendapatkan upah). Para pekerja menganggur dan rendahnya daya beli mereka membuat membuat pemilik pabrik enggan untuk memanfaatkan kapasitas produksi mereka. Ini adalah contoh dari sebuah kegagalan pasar yang terjadi karena mekanisme dari pasar itu sendiri dan bukan karena tindakan pemerintah untuk meregulasi pasar.

2. Pendekatan NeoKlasik

Dalam ekonomi politik klasik, pasar dipandang sebagai sistem yang terdiri dari transaksi- transaksi yang dilakukan secara sukarela antarbeberapa pemilik properti yang independen yang semuanya sama-sama mengejar kepentingan pribadinya sendiri-sendiri. Menurut pandangan neoklasik transaksi ini baru akan terjadi kalau dianggap bisa memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Perbedaan dengan klasik terletak pada cara pandang melihat mekanisme pasar. Bahwa dalam pasar ketika setiap individu bebas menjadi produsen maupun konsumen maka akan memunculkan adanya monopoli baik itu barang maupun

individu secara kolektif, hal itulah yang dinamakan dengan kegagalan pasar. Maka peran pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dalam pasar maupun tindakan birokrat didalam fungsi kekuasaan pemerintahan. Dengan intervensi pemerintah diharapkan bisa memperbaiki masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam mekanisme pasar.

Menurut Rachbini (2002:160) bentuk-bentuk kegagalan pasar yang mungkin terjadi dalam sebuah negara adalah :

- a. Monopolistik, manakala penjualnya banyak namun jenis barang yang beredar hampir sama dan mirip. Sehingga ketika produk satu tidak ada, maka bisa digantikan dengan produk yang lain. Hal ini menyebabkan produsen tidak bisa menetapkan harga sesukanya karena banyaknya produsen yang juga menawarkan harga yang kompetitif.
- b. Oligopoli terjadi manakala jumlah produsen sedikit. Barang yang beredar umumnya memiliki perbedaan namun beberapa lainnya terdeferensiasi sehingga produsen juga bisa memiliki kekuasaan untuk mengendalikan harga.
- c. Monopoli merupakan persaingan yang tidak sehat karena hanya ada satu produsen dipasar. Sehingga harga bisa ditentukan sesuai dengan keinginan produsen. Contohnya seperti minyak bumi, listrik, telepon.

3. Pendekatan Keynesian

Aliran keynesian menerima argumen bahwa perekonomian kapitalis kalau dibiarkan bekerja sendiri tanpa regulasi dari luar, tidak bisa memanfaatkan secara sepenuhnya sumber daya yang tersedia. Kegagalan ini akan memaksa pemerintah untuk melakukan intervensi. Dalam aliran ini ketidakstabilan dari pererkonomian kapitalis menimbulkan keraguan terhadap hipotesis tentang tangan tidak terlihat (*invisible hands*). Aliran keynesian berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah harus diadakan untuk menjamin adanya stabilitas dan proses reproduksi dan adanya penyerapan tenaga kerja secara memadai.

Ciri khas pendekatan keynesian yang membedakannya dengan pendekatan neoklasik dapat dilihat pada pendekatan keynesian bahwa keputusan investasi lebih dipengaruhi oleh perkiraan akan permintaan dimasa depan daripada biaya produksi yang sudah terjadi. Pandangan ini memiliki instabilitas dari pasar yang meregulasi dirinya sendiri.

Tenaga kerja adalah inti dari permasalahan instabilitas ekonomi politik karena pertama, pasar tenaga kerja adalah mekanisme yang digunakan sebagian besar individu dalam perekonomian kapitalis untuk mendapatkan nafkah bagi kehidupan mereka. Kedua, kontrak upah menghubungkan antara permintaan produk dengan upah dan penyerapan tenaga kerja.

Analisis pendekatan keynesian terhadap pasar tenaga kerja dipusatkan pada implikasi- implikasi dari negosiasi upah terhadap permintaan. Karenanya, analisis keynesian memandang bahwa ada kemungkinan bahwa keputusan yang dibuat antarpelaku pasar (yaitu pekerja dan perusahaan) akan membawa dampak negatif. Analisis keynesian terhadap kegiatan menabung juga dikembangkan kearah yang sama, yaitu menunjukkan potensi terjadinya konflik antara rasionalitas dari pelaku pelaku individual dan rasionalitas dari sistem secara keseluruhan.

F. Penelitian Terdahulu

Susanti (2007) dalam Koordinasi *Stakeholder* dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bentuk-bentuk kegiatan koordinatif dalam pencegahan dan

penanggulangan masalah HIV/AIDS serta pola komunikasi antar *stakeholder* dan kemitraan mereka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kemitraan yang terjadi antar *stakeholder* dalam kegiatan penanggulangan HIV/AIDS masih mengalami hambatan operasional. Penelitian ini juga menyarankan agar KPAD memiliki seorang pelaksana yang mampu mengelola kemitraan yang ada secara berkelanjutan. Manfaat bagi penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pentingnya pengelolaan dan pengalaman dalam kemitraan untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan hambatan operasional.

Rahmat (2009) dalam Analisis Implementasi Program Pembangunan Daerah di Kota Pare-pare. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai program implementasi yang ada di kota Pare-pare dan faktor-faktor yang mungkin mendukung keberhasilan dari implementasi tersebut. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor dukungan administrasi dan dukungan publik memberi pengaruh yang positif terhadap tingkat keberhasilan dari implementasi program pembangunan daerah. Sementara faktor komunikasi antar *stakeholder* masih kurang efektif dalam mengkomunikasikan kebijakan pembangunan terutama aspek program penganggaran pembangunan daerah. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsi pemikiran terhadap pola komunikasi yang seharusnya dilakukan oleh *stakeholder* dalam melakukan koordinasi.

Abbas (2005) dalam Mekanisme Partisipasi *Stakeholder* Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Penelitian ini mengangkat masalah mengenai mekanisme yang dibutuhkan dalam perencanaan partisipasi *stakeholder* Taman Nasional Gunung Rinjani. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat

kepentingan dan pengaruh *stakeholder*, mengetahui kebutuhan dan aspirasinya, pola partisipasi yang berkembang, dan faktor kunci dalam kegiatan partisipatif. Dari hal tersebut penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* yang paling tergantung pada TNGR sementara pemerintah dan LSM memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsi pemikiran tentang peran masing-masing *stakeholder* dalam perencanaan program ditinjau dari konsep *governance*.

Akmal (2006) dalam Koordinasi antar Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai konsep pelaksanaan dan cara mengembangkan mekanisme tatakerja dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa koordinasi antar instansi terkait di provinsi serta kabupaten/kota di bidang perencanaan masih belum dapat terlaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun dalam hal identifikasi masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan sangat baik dan identifikasi terhadap tujuan, tugas dan fungsi masing-masing instansi telah terbagi sebagaimana mestinya. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan tentang mekanisme tata kerja koordinasi antar SKPD dalam mencapai koordinasi yang efektif di daerah.

Tabel 1. Perbandingan Sederhana Penelitian Terdahulu dan Sekarang

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	
		Terdahulu	Sekarang
1.	Susanti (2007)	Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa koordinasi yang dilakukan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pada tingkat antar instansi berjalan

		<i>stakeholder</i> mengalami hambatan oprasional.	dengan lebih baik dibandingkan dengan pedagang
2.	Rahmat (2009)	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa faktor dukungan administrasi dan publik menentukan tingkat keberhasilan sebuah pembangunan daerah	Animo masyarakat yang tinggi menciptakan dukungan tersendiri bagi keberlangsungan dari PWBT
3.	Abbas (2005)	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa terdapat peran masing-masing <i>stakeholder</i> yang mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan mendominasi dalam sebuah kebijakan.	Peran masing-masing aktor sangat jelas dan terbagi berdasarkan kebutuhan dari pengelolaan PWBT, walau beberapa kegiatan masih kurang pengawasan dan cenderung tidak koordinatif.
4.	Akmal (2006)	Hasil penelitian ini mengatakan bahwa interaksi antar instansi terkait belum dapat berjalan dengan baik bila hanya mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan.	Masalah-masalah yang terkait dengan pengeloan dan penataan hanya sebatas keinginan masyarakat untuk mengembangkan PWBT menjadi pasar yang lebih besar lagi dan dapat menampung lebih banyak pedagang lagi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada hakekatnya penelitian ini berupaya mengembangkan konsep dan fakta secara mendalam untuk menjawab pertanyaan bagaimanakah interaksi antar aktor dalam kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu di Kota Malang, sebagai upaya dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM sebagai sebuah terobosan dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat senantiasa menjadi obyek utama dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dan menjadi stimulus dalam perbaikan dan pemulihan ekonomi daerah.

Oleh karena itu penelitian ini menekankan pada proses pencarian dan pengungkapan makna mendalam dari fenomena inteksi yang terjadi dalam penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu, dengan tujuan agar dapat mengungkapkan peristiwa nyata-nyatanya yang terjadi dilokasi penelitian dan untuk mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi, maka penelitian ini digolongkan pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu mengetahui dampak dari kebijakan yang selama ini bergulir terhadap kondisi dari Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang.

Dengan penelitian kualitatif ini dapat menghasilkan gambaran (deskripsi)

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses interaksi dan peran masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu. Selanjutnya metode deskriptif “ digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi” (Sugiyono, 2011 : 147). Sedangkan pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif, dimana merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek ilmiah (Sugiyono dalam Harbaning Pasalong, 2012 : 161).

Dalam uraian tersebut digaris bawahi bahwa dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dan informasi di dinas pariwisata serta paguyuban pasar wisata belanja tugu kota malang sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah serta objek dari kebijakan tersebut. dari metode yang digunakan peneliti berharap mampu mengungkapkan berbagai pertimbangan yang dipakai oleh pengambil keputusan dalam menetapkan rencana pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan adanya fokus penelitian, agar peneliti tidak terjebak dengan banyaknya atau melimpahnya volume data yang diperoleh selama proses penelitian di lapangan, maka dengan fokus penelitian dapat membatasi studi dan kajian serta mengarahkan jalannya penelitian.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugiyono (2011:207) “Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak

dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis”.

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas dan diteliti agar tidak terjadi pergeseran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai penjelas mengenai objek yang diangkat serta solusi yang ingin dicapai melalui permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu :

1. Kebijakan pemerintah Kota Malang mengenai pasar wisata belanja tugu Kota Malang
 - a. Pelipaham wewenang pengelolaan dan penataan kepada dinas kebudayaan dan pariwisata Kota Malang
 - b. Tindakan dan peran dinas kebudayaan dan pariwisata dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang
 - c. Upaya stategis yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam peningkatan potensi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang
2. Interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan pasar wisata belanja tugu Kota Malang
 - a. Kerjasama dalam pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang
 - b. Peran masing-masing *stakeholder* dan keterlibatan publik
 - c. Hambatan dalam proses penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja

Tugu Kota Malang

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Sesuai fokus penelitian yang ada, lokasi penelitian dipilih sebagai tempat peneliti untuk memperoleh gambaran keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti di Kota Malang. Oleh karena itu baik lokasi penelitian maupun situs penelitian perlu dipaparkan guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian sehingga dapat memberikan kejelasan yang tepat untuk mengumpulkan dan mengelompokkan data-data yang diperlukan, dengan demikian maka :

1. Penelitian ini berlokasi di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang
2. Penelitian ini juga akan berlokasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, Jl. Mayjen Sungkono, Gedung perkantoran terpadu lantai 3

Dan situs dari penelitian ini adalah :

1. Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Malang yang berwenang menangani penataan dan pengelolaan dari Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang
2. Pedagang yang aktif berjualan di Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang.

D. Sumber Data

Sejalan dengan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, maka pengambilan sampel dilakukan secara selektif. Disini peneliti memakai berbagai pertimbangan yang berdasarkan pada konsep teori yang digunakan, keingintahuan peneliti, dan sebagainya. dengan demikian dapat diperoleh informasi yang *valid*, *realistis*, dan bermakna untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan.

Dalam kaitan tersebut menurut Harbani Pasolong (2012 :70) data dibagi atas :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Jadi data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya. Data primer merupakan data sensus karena dikumpulkan, diolah, serta diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik.
2. Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Jadi data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya. Data yang diperoleh dari penelitian lain atau dari catatan di instansi, atau darimana saja sudah diolah, merupakan data sekunder

Dalam hal ini data primer nantinya akan diperoleh dari informan, informan disini merupakan orang yang bisa memberikan informasi terkait dengan pengetahuannya sesuai dengan fokus dari penelitian ini dan informasi yang diberikan oleh informan dianggap oleh penulis sangat sesuai dan relevan dengan fokus penelitian. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Ibu Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Para pedagang aktif yang terlibat termasuk didalamnya ketua paguyuban PWBT.

Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dan memiliki hubungan yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan nantinya dalam penelitian ini adalah data-data yang berisi mengenai

pengembangan UMKM dan proses pengelolaan pedagang kecil yang terkait dengan PWBT. Selain itu juga terdapat penyajian dokumen yang terkait dengan perkembangan UMKM yang menunjukkan potensi dan sumbangsi mereka selama beberapa tahun.

E. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data ini terdiri dari tiga proses kegiatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian

Pada tahap ini merupakan tahap persiapan bagi peneliti sebelum memasuki kancha penelitian. Peneliti terlebih dahulu menyerahkan surat izin penelitian kepada kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan fokus penelitian ini, maka peneliti menginformasikan tentang kegiatan penelitian kepada instansi yang dijadikan situs dari penelitian dengan melampirkan surat keterangan penelitian.

2. Ketika berada di lokasi penelitian

Dalam tahap ini peneliti melakukan wawancara dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian ini. Wawancara yang dilakukan berdasarkan atas wawancara terstruktur yang telah peneliti persiapkan sebelum melakukan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur berdasarkan

perkembangan yang terjadi di lapangan yang semuanya tetap berdasarkan dan mengarah kepada fokus penelitian. Sehingga waktu yang digunakan sangat bermanfaat bagi pengumpulan data dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa wawancara nantinya akan berdasarkan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Sedangkan observasi, peneliti akan terjun ke lapangan dalam hal ini Pasar Wisata Belanja Tugu untuk melihat situasi dan pelaksanaan dari kebijakan penataan dan pengelolaan sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan. Selain itu akan ada dokumentasi dimana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati, mencatat, atau menyalin dokumen-dokumen, arsip-arsip yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah *key instrument* atau alat penelitian utama. Peneliti adalah yang mengadakan observasi atau wawancara dengan hanya menggunakan buku catatan. Peneliti sebagai instrumen yang mampu

membaca segala gejala alam sebagai obyek penelitian. Adapun untuk memperjelas instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri

Merupakan instrumen yang paling penting dan terutama dalam pengumpulan data. Peneliti akan menggunakan alat indra untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan

2. Pedoman wawancara

Merupakan suatu daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti sebagai acuan dalam mendapatkan data dari narasumber yang terkait dengan penelitian dan masalah yang diangkat oleh peneliti.

3. Perangkat penunjang lain

Perangkat lain yang akan digunakan oleh peneliti berupa referensi-referensi dari berbagai sumber yang mungkin akan mendukung data atau informasi yang dibutuhkan selama melakukan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti akan berusaha menganalisis data yang ada dan berusaha memilah-milah data agar dapat digunakan dan bermanfaat bagi penelitian. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan selama proses analisis data adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada persoalan yang penting, serta mencari tema dan polanya. Peneliti melakukan proses reduksi data mulai dari fokus pertama hingga terakhir yang bertujuan untuk mendapatkan data pokok yang benar-benar cocok dan dibutuhkan dalam melakukan pembahasan.

2. Penyajian data

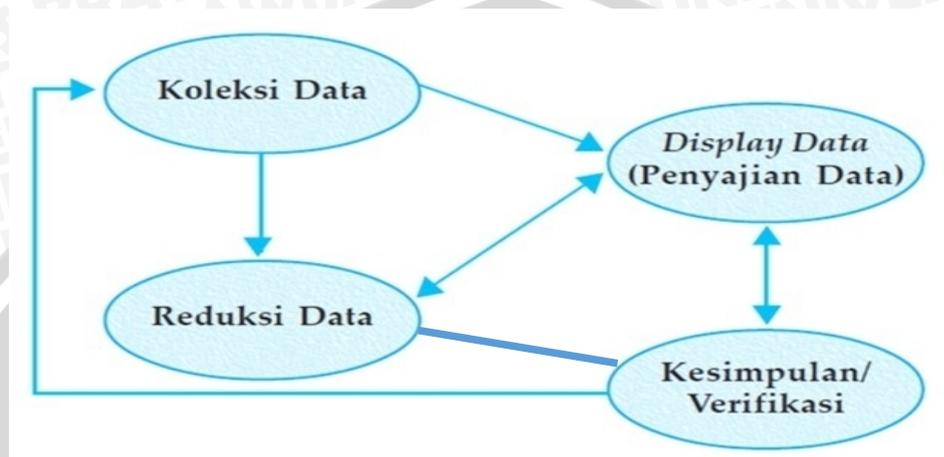
Penyajian data merupakan kegiatan penyajian dan penyusunan sistematis dan logis agar data-data tersebut mudah dipahami serta mudah dimaknai sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data biasanya berupa sekumpulan informasi yang memberrikan gambaran mengenai kondisi dari penelitian dan kemungkinan terdapat penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dari analisis data. Dimana peneliti berusaha menarik sebuah garis besar dari data dan informasi yang telah didapat, untuk kemudian dijadikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Komponen-komponen analisis data dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 8. Analisis Data Model Interaktif



Sumber : Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2011 : 247

H. Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini mengacu pada empat kriteria yang dikemukakan Moleong (2009:324), yaitu standar kepercayaan (*credibility*), standar keteralihan (*transferability*), standar ketergantungan (*dependability*), dan standar kepastian (*confirmability*).

Standar kepercayaan merujuk kepada kepercayaan pembaca dan persetujuan partisipan (responden) penelitian terhadap hasil temuan. Untuk memenuhi standar tersebut dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dan *peer debriefing*. Triangulasi dioperasionalkan dalam bentuk triangulasi sumber data yaitu membandingkan dari hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen, membandingkan pernyataan informan di depan umum dengan pernyataan informan secara pribadi, dan membandingkan prespektif informan yang berbeda latar belakang mengenai suatu isu. Teknik *peer debriefing* dioprasionalisasikan dengan melibatkan sejawat peneliti yang tidak ikut dalam penelitian untuk membicarakan atau memberikan kritik terhadap proses dan hasil penelitian, sehingga dapat diperoleh masukan atas kelemahan yang terjadi dari penelitian yang dilakukan, dalam bentuk diskusi informal, seminar hasil penelitian, dan bimbingan skripsi. Standar keteralihan berkaitan dengan kemampuan temuan hasil penelitian untuk diberlakukan dalam konteks yang sama. Untuk mencapai standar tersebut peneliti berupaya memperkaya atau mengurai secara rinci deskripsi konteks dari fokus penelitian.

Standar kebergantungan berhubungan dengan kemampuan hasil studi untuk diulang kembali atau dibuat replikasi. Untuk memperoleh standar tersebut peneliti berupaya untuk mendokumentasikan jejak aktivitas lapangan, baik dalam bentuk catatan, dokumen atau arsip lapangan, sehingga dapat dilakukan pengecekan atau penelitian terhadap salah atau benarnya peneliti dalam melakukan pengumpulan data, menginterpretasikan temuan, dan melaporkan hasil temuannya. Aktifitas auditing tersebut telah dilakukan dalam penelitian ini melalui mekanisme konsultasi bimbingan skripsi yang dilakukan oleh peneliti kepada dosen pembimbing.

Standar kepastian merujuk kepada kepastian hasil penelitian dengan memperlihatkan topangan rekaman data lapangan. Untuk memperoleh standar ini

dilakukan pengecekan atau penilaian oleh dosen pembimbing selama berlangsungnya proses konsultasi skripsi, bersamaan dengan pemeriksaan standar ketergantungan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

1.1 Kondisi Geografis

Kota Malang merupakan salah satu kota yang tergolong kota yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari data besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang yang cukup tinggi, yaitu menduduki peringkat 2 dari 33 kabupaten/kota yang terdapat di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Pencapaian ini tidak lepas dari kegiatan ekonomi masyarakat Kota Malang dalam berbagai masing-masing sektor ekonomi yang menciptakan sebuah iklim yang baik untuk pertumbuhan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang ada di Kota Malang. Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir adalah sektor pertanian, kemudian di ikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran sektor industri pengolahan serta sektor jasa.

Secara geografis Kota Malang terletak pada ketinggian 440-667 meter diatas permukaan air laut dan secara astronomis terletak $112,06^{\circ}$ - $112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Sedangkan bila dilihat dari segi kewilayahan, maka batas wilayah Kota Malang sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

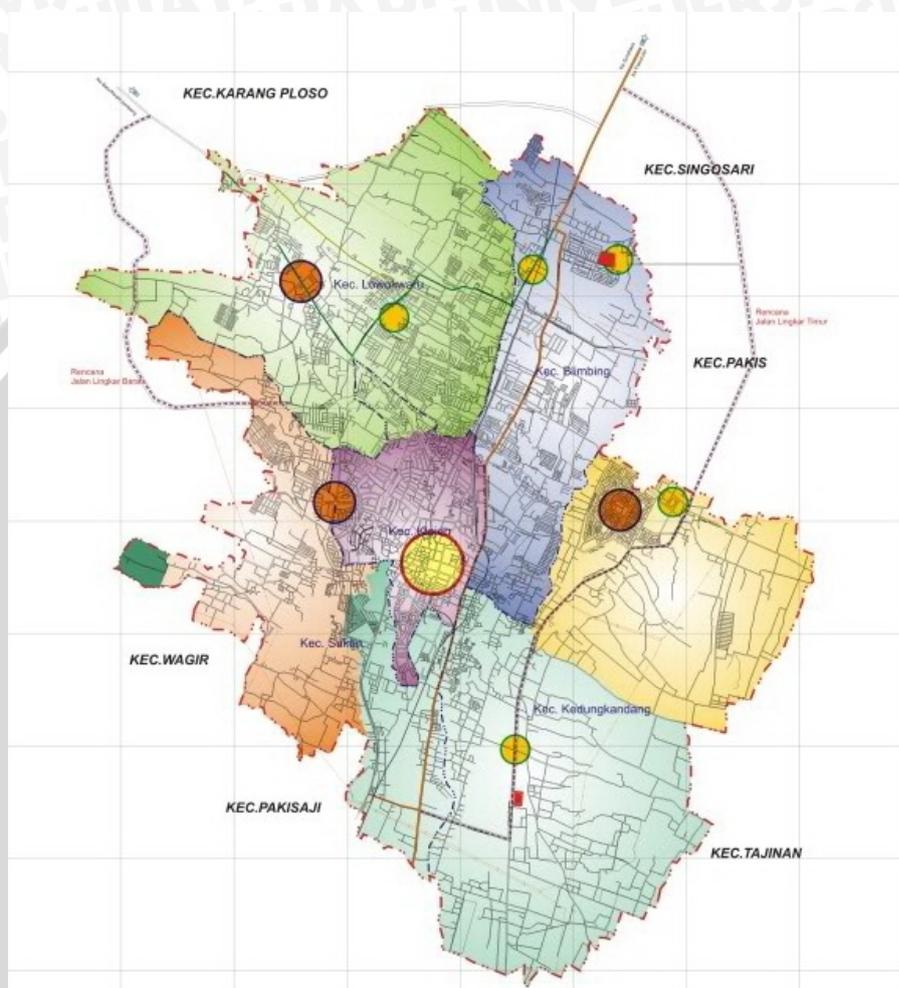
- a. Gunung Arjuno di sebelah Utara
- b. Gunung Semeru di sebelah Timur
- c. Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat
- d. Gunung Kelud di sebelah Selatan

Sumber: <http://www.malangkota.go.id/halaman/1606076#ixzz31ImVCSCi>

Dengan luas wilayah sekitar 110,06 km², Kota Malang menduduki urutan kedua kota terbesar setelah Surabaya sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Timur. Dari total seluruh luas wilayah tersebut hampir 40 persen merupakan lahan pertanian atau digunakan untuk pembangunan sektor agraris, sedangkan sisahnya merupakan tempat pemukiman, perdagangan dan jasa.

Untuk lebih memperjelas letak dan batas wilayah Kota Malang dapat dilihat dari Gambar/peta Kota Malang berikut ini :

Gambar 9. Peta Kota Malang



Sumber : Malang Dalam Angka 2011

Secara administratif Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan. Adapun nama kecamatan dan pembagian wilayah sebagaimana terlihat dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Pembagian Wilayah Kota Malang

Kecamatan <i>Districts</i>	Luas <i>Districts areas (km²)</i>	Presentase <i>Presentage</i>	Jumlah kelurahan
Kedungkandang	39,89	36,24	12
Sukun	20,97	19,05	11
Klojen	8,83	8,02	11

Blimbing	17,77	16,15	11
Lowokwaru	22,60	20,53	12

Sumber : BPS Kota Malang 2012

1.2 Iklim dan Cuaca

Kota Malang dikelilingi oleh wilayah pegunungan antara lain Gunung, Semeru, Kawi, Anjasmoro, dan Arjuno. Sebagian besar pola bentang alam wilayah Kota Malang merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0 - 15% yang meliputi 96.3% luas wilayah Kota Malang, sedangkan sisanya 3,7% merupakan kawasan berlereng dengan kemiringan 10 - 16%.

Kota Malang memiliki kondisi iklim tropis sebagaimana umumnya daerah lainnya di Jawa Timur. Kota Malang memiliki curah hujan rata-rata 1.833 mm dalam satu tahun. Suhu udara rata-rata satu tahun Kota Malang pada tahun 1997 adalah 23,40C, untuk suhu udara maksimum rata-rata dalam satu tahun adalah 32,40C, sedangkan suhu udara minimum rata-rata dalam satu tahun sebesar 15,20C. Lembab nisbi rata-rata satu tahun adalah 74% dan penyinaran matahari rata-rata dalam satu tahun sebesar 73%.

1.3 Geologi dan Morfologi

Secara geologi daerahnya disusun oleh batuan hasil kegiatan gunungapi yang terdiri dari tufa, tufa pasir, breksi gunung api, aglomerat, dan lava. Secara hidrogeologi akumulasi air tanah di Cekungan Malang dijumpai pada lapisan akuifer yang dapat dipisahkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok akuifer dengan kedalaman kurang dari 40 m, kelompok akuifer dengan kedalaman antara

40 - 100 m, dan kelompok akuifer dengan kedalaman antara 100 m -150 m. Secara morfologi Kota Malang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) satuan morfologi, yaitu satuan morfologi dataran yang menempati bagian tengah dan selatan, satuan morfologi pebukitan bergelombang menempati bagian timur dan utara, dan satuan morfologi pegunungan menempati wilayah bagian barat, utara dan timur.

1.4 Demografi

Jumlah penduduk di Kota Malang sampai pada akhir tahun 2010 sebesar 820.243 yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan 415.690 jiwa penduduk perempuan. Bila melihat luas wilayah Kota Malang yang hanya 110,06 km² maka kepadatan penduduk dapat mencapai 7,453 jiwa/km² pada tahun 2010, angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan beberapa kota lain yang berkisar hanya 4 hingga 5 jiwa/km². Untuk lebih memperjelas perkembangan penduduk pada tahun 2010 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Penduduk <i>Population of Concensus</i>		Laju Pertumbuhan penduduk/Thn	Kepadatan penduduk/ Km ² 2012
			2000	2012		
1.	Kedungkandang	39.89	150.262	176.342	2.7	4,420
2.	Sukun	20.97	162.094	182.103	0.68	8,683
3.	Klojen	8.83	117.500	105.984	-1.88	12,002
4.	Blimbing	17.77	158.556	172.874	0.74	9,728
5.	Lowokwaru	22.60	168.570	186.139	1.97	8,236
	Jumlah/Total	110.06	756.982	823.442	0.88	7,481

Sumber : Malang dalam Angka 2012

Bila melihat data tersebut potensi pertumbuhan penduduk di Kota Malang dapat dikatakan cukup tinggi, data lain mengatakan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2011 akhir tingkat pertumbuhan penduduk Kota Malang hanya berkisar 0,86% dan jumlah penduduk Kota Malang sampai saat akhir 2011 mencapai 894.653. dimana jumlah tersebut terdiri dari 447.617 jiwa penduduk

laki-laki dan 447.036 jiwa merupakan penduduk perempuan. Dari data tersebut terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Malang setiap tahunnya mengalami perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri dari pemerintah kota khususnya, sebab dengan bertambahnya jumlah penduduk maka berarti juga memerlukan tambahan lapangan pekerjaan.

Adapun perkembangan jumlah tenaga kerja dapat dirinci pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012
1	Angkatan Kerja	Orang	534.675	553.345	554.678
2	Angkatan Kerja Tertampung	Orang	392.706	300.247	300.147
3	Pencari Kerja	Orang	4.361	3.452	3.563
4	Penduduk Usia Kerja	Orang	4.697	4.045	4.120
5	Penduduk Bukan Usia kerja	Orang	0	0	0

Sumber : Berbagai Sumber Diolah

Sesuai dengan data pertumbuhan penduduk tahun 2010 dan 2011 diatas maka hampir semua penduduk Kota Malang yang masuk kategori usia kerja merupakan mereka yang masih berada pada usia produktif dan siap untuk bekerja, yaitu pada umur diatas 15 tahun keatas. Dan dari total jumlah keseluruhan tersebut jumlah penyerapan tenaga kerja pada akhir tahun 2011 mencapai 300.247 atau sekitar 54,6% dari total keseluruhan angkatan kerja.

Selain peningkatan lapangan pekerjaan pemerintah kota juga harus

memperhatikan tingkat kebutuhan minimum penduduk, untuk dapat dikatakan layak hidup tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi harus diikuti dengan upah minimum sesuai dengan kebutuhan penduduk. Dari rata-rata kebutuhan minimum penduduk tahun 2008 hingga 2010 masih sekitar 11,2% lebih tinggi dibandingkan dengan upah minimum Kota Malang dengan kata lain penyerapan jumlah tenaga kerja yang tinggi masih belum menjamin terpenuhinya kebutuhan minimum penduduk. Untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai kebutuhan minimum penduduk dengan upah minimum kota dapat dilihat dalam tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Kebutuhan hidup Layak dan Upah Minimum Kota Malang

Tahun	Kebutuhan Hidup Layak (Rupiah)	Upah Minimum Kota (Rupiah)
2007	756.603,74	745.109
2008	859.509,61	802.904
2009	961.999,40	945.373
2010	1.006.590,04	1.006.263
2011	1.143.670,06	1.120.327

Sumber : Malang Dalam Angka 2012 (data diolah)

Sesuai dengan data tersebut mulai tahun 2006 hingga 2010 perbaikan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang terkait dengan pemenuhan kebutuhan minimum untuk dapat dikatakan layak hidup mengalami peningkatan sekitar 9,87% setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan rakyat yang diimbangi dengan pertumbuhan

penduduk dan permintaan akan lapangan kerja yang meningkat.

1.5 Kondisi Perekonomian

Kota Malang merupakan salah satu kota yang tergolong memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Malang yang menduduki peringkat 2 dari seluruh kota di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Cukup tingginya aktivitas ekonomi di Kota Malang tidak terlepas dari tingginya aktivitas masyarakat dalam masing-masing sektor ekonomi yang ada di Kota Malang. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi dalam kurun dua tahun sejak tahun 2009 hingga 2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran kemudian sektor pengolahan barang industri.

Perekonomian di Kota Malang hampir seluruhnya didominasi oleh sektor perdagangan dan pengolahan industri, selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5. Peranan ekonomi sektoral dari PDRB Kota Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010-2011

No	Sektor	2010 (%)	2011 (%)
I	Pertanian	0,40	0,35
II	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,04
III	Industri Pengolahan	30,29	30,34
IV	Listrik, Gas, & Air Bersih	1,70	1,30
V	Bangunan	2,67	2,97
VI	Perdagangan, Hotel & Restoran	40,74	40,55
VII	Pengangkutan & Komunikasi	3,28	3,47
VII	Keuangan, Persewaan & Jasa	7,66	10,60
I	Jasa-jasa	13,22	10,28

IX			
	PDRB dengan MIGAS	100,00	100,00

Sumber : Malang Dalam Angka 2012

Dari tabel di atas dapat dilihat sektor-sektor yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi Kota Malang adalah :

1. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang dapat mencapai rata-rata 40,25%. Sektor ini merupakan sektor paling tinggi bila dibandingkan dengan delapan sektor lain yang mendukung perekonomian Kota Malang.
2. Sektor industri pengolahan, sektor ini merupakan sektor kedua pemberi sumbangsi terbesar dalam aktivitas perekonomian di Kota Malang. Dengan rata-rata 30,59% dalam kurun waktu 2 tahun sektor ini mengungguli sektor jasa-jasa serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
3. Sektor terakhir yang memberikan sumbangsi cukup besar terhadap aktivitas ekonomi Kota Malang adalah sektor jasa-jasa yang memberikan rata-rata 13,24% dalam kurun waktu 2 tahun.

Dari tabel pertumbuhan yang ada sektor pertanian dan perdagangan dalam kurun waktu tiga tahun terus mengalami penurunan dan dapat dikatakan semakin berkurang, hal ini sebanding dengan pertumbuhan yang pesat yang ditunjukkan oleh sektor pembangunan. Secara umum tingkat pertumbuhan sektor pembangunan akan mengurangi sektor-sektor yang berhubungan dengan agraris dan pertambangan, perubahan pola penggunaan lahan yang terjadi mengakibatkan menurunnya beberapa sektor disamping meningkatnya sektor tertentu.

Berbanding terbalik dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pengangkutan dan komunikasi, perlahan namun pasti sektor ini terus mengalami peningkatan secara konstan setiap tahun dan menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik mengingat sumbangsi yang cukup besar dalam PDRB Kota Malang. Tingkat pertumbuhan yang baik diikuti dengan pemberian sumbangsi yang besar terhadap aktivitas perekonomian menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang cukup menjanjikan dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Bila dibandingkan dengan sektor pengolahan industri, walau memberikan sumbangsi besar dalam PDRB Kota Malang namun laju pertumbuhannya setiap tahun tidak setinggi sektor lain dan cenderung konstan atau tetap. Dengan kata lain sektor pengolahan industri bukan merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang ada di Kota Malang.

1.6 Kondisi Perdagangan

Berdasarkan data-data yang dipaparkan di atas sektor perdagangan merupakan sektor yang cukup menjanjikan untuk pembangunan perekonomian Kota Malang selain memiliki sumbangsi dalam PDRB Kota Malang yang paling tinggi sektor perdagangan juga memiliki tingkat pertumbuhan yang konstan setiap tahun. Untuk melihat bahwa sektor perdagangan merupakan sektor unggulan Kota Malang penghitungan dilakukan dengan analisis *Location Question* (LQ). Teknik LQ disebut juga model ekonomi basis karena untuk memahami sektor-sektor ekonomi yang menjadi basis atau sebagai sektor-sektor dominan

(unggulan). Angka LQ akan memberikan petunjuk sektor-sektor yang berprospek ekspor dan sektor-sektor yang berpeluang hanya menyediakan untuk kebutuhan internal sendiri bahkan yang berprospek impor. Interpretasi dari hasil penghitungan analisis LQ adalah :

1. $LQ \geq 1$ berarti sektor tersebut adalah sektor basis

Sektor yang merupakan basis adalah sektor unggulan yang dapat dijadikan referensi dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai sektor utama pendukung kegiatan perekonomian Kota Malang

2. $LQ < 1$ berarti sektor tersebut adalah sektor non basis

Sektor non basis adalah sektor yang bukan merupakan sektor unggulan di Kota Malang dan berperan hanya sebagai *support* kegiatan perekonomian saja bukan sebagai pembangunan perekonomian seperti sektor basis.

Untuk lebih memperjelas analisis LQ tersebut dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Hasil Penghitungan LQ Potensi Sektor Basis dan Non Basis tahun 2012

No	Lapangan Usaha	PDRB		LQ
		Kota Malang	Jatim	
1.	Pertanian	122,398.04	154,459,455.07	0.02
2.	Pertambangan &	10,396.62	20,803,127.63	0.01

	Penggalian			
3.	Industri Pengolahan	12,762,601.69	271,595,956.73	1.22
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	497,499.71	13,554,934.68	0.95
5.	Bangunan	1,246,745.09	45,551,080.91	0.71
6.	Perdagangan, Hotel, Restoran	14,887,126.52	304,489,114.05	1.27
7.	Pengangkutan & Komunikasi	1,117,362.42	57,089,991.32	0.51
8.	Keuangan, Persewaan & JS. PRSH	3,138,816.94	50,558,396.67	1.61
9.	Jasa-jasa	4,740,084.79	83,609,822.40	1.47
	PDRB	38,512,635.20	997,866,681.30	

Sumber : BPS Kota Malang

Berdasarkan tabel 6 tersebut terlihat ada 4 lapangan usaha besaran LQ berada di atas angka 1 yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dan Jasa-jasa. Dari hal ini jelas bahwa sektor perdagangan berpotensi sebagai sektor unggulan yang dapat dikembangkan oleh Kota Malang, kemudian seperti yang kita tau bahwa sektor perdagangan sendiri dibagi atas sektor informal dan formal yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan perekonomian. Menurut perhitungan BPS pada tahun 2006 sektor informal berkembang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan sektor formal, sektor informal yang didominasi oleh UMKM mampu menyerap tenaga kerja lebih baik dibandingkan dengan sektor formal.

Potensi sektor informal dan formal Kota Malang bergerak dinamis hingga pada pencapaian hasil dari sektor tersebut dapat digunakan sebagai

komoditi ekspor Kota Malang. Untuk melihat potensi sektor perdagangan khususnya sektor informal dan formal yang dapat menjadi komoditi ekspor dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 7. Realisasi Ekspor Kota Malang

No	Jenis Komoditi	Volume (kg)	Nilai (US\$)
1	Perhiasan emas/ <i>Gold chain</i>	520.473,56	6.763.716,55
2	Kerajinan perak/ <i>Silver handicraft</i>	249.919,40	64.479,95
3	Kulit/ <i>Leather</i>	49.591,50	352.283,03
4	Lantai Kayu/ <i>Flooring</i>	671.654,23	1.230.980,48
5	Sapu / Broom Complete	391.084,00	798.469,10
6	Tembakau/ <i>Tobacco</i>	39.132,60	393.092,80
7	Mebel/ <i>Furniture</i>	122.141,12	577.453,05
8	Tepung Tapioka/ <i>Tapioca Flour</i>	26,00	7.955,00
9	Textile dan Sandang	98.064,20	109.301,78
	Jumlah	2.160.679,61	9.918.651,74

Sumber : Malang Dalam Angka 2012

Dari tabel 7 kita dapat membandingkan bahwa sektor informal yang menjadi sektor unggulan berdasarkan hasil penghitungan LQ ternyata merupakan komoditi ekspor yang dimiliki oleh Kota Malang, sehingga jelas bahwa sektor informal memiliki peran yang besar dalam pengembangan Kota Malang. Bila melihat data yang tersaji berdasarkan penelitian yang dilakukan BPS maka ada beberapa sektor yang merupakan hasil dari UMKM yang juga merupakan hasil dari sebagian kecil PWBT yaitu kerajinan kulit, perak sapu, dan mebel. Dari data tersebut jelas bahwa hampir 40% jenis komoditi ekspor yang dihasilkan oleh Kota Malang berasal dari sektor informal atau UMKM, tentu saja ini juga mendukung data-data penghitungan yang dilakukan oleh BPS sebelumnya. Disamping itu

sektor lain seperti perhiasan, tepung tapioka, dan lantai kayu memang didominasi oleh sektor formal tetapi sebagian kecil berasal dari informal. Melihat hal ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, kondisi perdagangan yang dimiliki oleh Kota Malang sekarang didominasi oleh sektor perdagangan informal yang juga menjadi potensi kuat untuk pengembangan perekonomian lokal masyarakat yang berbasis UMKM dimana masyarakat menjadi aktor utama dan pemerintah yang menjadi *support* bagi mereka dalam pengembangan dan pengelolaan serta permodalan.

Dari semua data yang ada maka jelas bahwa sektor perdagangan khususnya sektor informal masih menjadi sektor unggulan di Kota Malang yang mampu memberikan sumbangsi tidak hanya dalam perekonomian tetapi juga penyelesaian masalah terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Perkembangan dan potensi yang ditunjukkan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa dinamika perekonomian dan perdagangan ekonomi Kota Malang didominasi oleh sektor perdagangan baik sektor informal maupun formal.

B. Hasil Fokus Penelitian

1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai PWBT

1.1 Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Dan Penataan Kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang

Pelimpahan wewenang penataan dan pengelolaan PWBT dilandasi oleh

SK Walikota Malang Nomer 213 tahun 2005, didalamnya pemerintah kota sebagai pemegang kewenangan dalam kota mengatur dan mengelola serta memberdayakan masyarakat untuk dapat mandiri dan bersaing dalam dunia kerja melalui sektor informal. SK walikota ini dikeluarkan karena saat itu banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan dan buruh mereka sebagai imbas krisis moneter, yang mempengaruhi tingkat inflasi Kota Malang yang tidak terkendali. Selain itu banyaknya perusahaan yang bangkrut dan tidak dapat membayar uang pesangon untuk karyawan mereka.

Sejak saat itu pengangguran di Kota Malang meningkat dan kesejahteraan masyarakat terus menurun, pemerintah kota saat itu sebagai bagian dari pemegang kepentingan mau tidak mau harus mengambil keputusan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja yang semakin banyak tetapi tidak diimbangi oleh lapangan kerja yang memadai. Saat itu sektor formal tidak dapat dijadikan sebagai sektor unggulan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga jalan keluar yang dilakukan adalah mengembangkan sektor informal dan memberdayakan karyawan-karyawan serta buruh pabrik untuk mampu mandiri dan bersaing selama krisis moneter yang terjadi.

Tanggal 28 Oktober 2005 PWBT resmi dibuka dan ditempatkan di luar stadion Gajahyana Kota Malang. Awalnya lokasi ini tidak diperuntukkan sebagai pasar wisata tetapi lebih kepada sentra perdagangan UMKM kota Malang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S selaku seksi pengelola data wisata Kota Malang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mengatakan :

“Awalnya PWBT bukan merupakan pasar wisata yang ditujukan untuk pengembangan potensi wisata Kota Malang, tetapi lebih kepada sentra lokal yang digunakan untuk menampung para karyawan dan buruh yang ingin berjualan pasca PHK yang dialami” (wawancara tanggal 29 April 2014)

Kemudian hal ini juga dikonfirmasi oleh Pak Solihin sebagai salah satu pedagang yang telah berjualan di PWBT hampir sepuluh tahun, yang mengatakan bahwa:

“Awale iku durung dadi koyok ngene mas, biyen iku mek onok pedagang-pedagang ae kumpul trus dodolan. Ambek pemerintah dikek'i tempat nang kene gawe dodolan bareng”(Awalnya belum jadi seperti ini mas, hanya ada pedagang-pedagang yang berkumpul dan jualan. Pemerintah memberi tempat di sini untuk berjualan bersama-sama). (Wawancara tanggal 4 Mei 2014)

Awal penataan dan pengelolaan PWBT dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang sendiri melalui Satpol PP untuk mengatur penataan grobak dan lapak para pedagang, tetapi sejalan dengan berjalannya waktu animo masyarakat terhadap PWBT ini meningkat dan menjadi salah satu tujuan wajib warga Kota Malang untuk *refreshing*, semenjak saat itu jumlah pengunjung PWBT semakin meningkat dan memberikan gairah baru bagi para pedagang. Untuk itu pemerintah mengganti fungsi PWBT tidak hanya sebagai pusat pengembangan UMKM saja tetapi juga sebagai salah satu tempat tujuan wisata Kota Malang.

Selanjutnya penataan dan pengelolaan PWBT diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk dikembangkan dan dipromosikan agar lebih banyak warga atau wisatawan yang datang ke Malang dan berkunjung ke PWBT. selama penangannan yang dilakukan Disbudpar PWBT telah berubah menjadi

pasar yang tidak hanya sebagai tempat berdagang tetapi juga sebagai budaya wisata yang mampu menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengelolaan yang dilakukan oleh Disbudpar didasarkan kepada Visi Kota Malang yang tergambar melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Malang serta dilandasi oleh Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam RPJMD Kota Malang tahun 2013-2018 disebutkan visi pemerintah Kota Malang untuk lima tahun ke depan (th. 2013-2018) adalah **“Menjadikan Kota Malang Sebagai Kota Bermartabat”** hal ini diikuti dengan semangat *Peduli Wong Cilik* untuk menciptakan sebuah pembangunan yang selaras dan seimbang. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kesejahteraan bagi *wong cilik*. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh *wong cilik* yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Selain itu, visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BERSih, Makmur, Adil, Religius** toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Adapun uraian visi dari Kota Malang adalah :

a. **Bersih**

Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

b. **Makmur**

Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.

c. **Adil**

Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan

penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

d. Religius-toleran

Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujud sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

e. Terkemuka

Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

f. **Aman**

Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

g. **Berbudaya**

Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

h. **Asri**

Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar

akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

i. **Terdidik**

Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa bergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

Untuk dapat mewujudkan visi dari landasan pengelolaan PWBT yang dilakukan oleh Disbudpar maka misi yang tertuang dalam Peraturan Walikota nomor 47 tahun 2012 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata kota Malang berisi mengenai :

- a. Mengembangkan dan Melestarian nilai sejarah, tradisi, adat istiadat dan peninggalan purbakala sebagai aset guna kepentingan pembelajaran dan pariwisata

- b. Menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya serta kearifan lokal sebagai media untuk mempererat persatuan dan kesatuan, rasa cinta tanah air;
- c. Menjadikan Sektor Pariwisata sebagai sector yang memberi manfaat untuk kemakmuran, keadilan, kesetaraan, pelestarian lingkungan hidup dan budaya
- d. Mengembangkan seluruh potensi pariwisata yang ada menjadi Obyek Daya Tarik Wisata yang terkemuka, memiliki daya jual dan daya saing yang kompetitif untuk kemakmuran masyarakat Kota Malang
- e. Mengembangkan, mempromosikan dan menjadikan pariwisata Kota Malang menjadi destinasi pariwisata unggulan yang menjunjung tinggi norma-norma religius-toleran, adat-istiadat, kearifan lokal, pelestarian lingkungan hidup dan karakteristik khas daerah Kota Malang
- f. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan
- g. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

1.2 Tindakan Dan Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Pembangunan PWBT merupakan langkah strategis karena pasar wisata tersebut merupakan bagian dari pengembangan sektor perdagangan yang disebut dengan UMKM, memiliki peranan yang besar pula dalam meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta sebagai upaya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Hal ini ditunjukkan dengan adanya keberadaan PWBT kegiatan ekonomi-sosial penduduk menjadi lebih baik dan mampu menjadi sektor unggulan Kota Malang sesuai dengan hasil LQ dan potensi dilihat dari sumbangsi PDRB Kota Malang.

Dalam masa krisis PWBT telah menunjukkan ketangguhannya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi seharusnya diarahkan untuk lebih menguatkan keberpihakan pada pemberdayaan usaha ekonomi rakyat melalui penumbuhan dan pengembangan usaha yang komprehensif dan terpadu sehingga keberadaan PWBT dapat menjadi pilar utama dalam mendorong perekonomian sektor informal Kota Malang. Hal ini karena PWBT memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan jumlah pelaku usaha terbesar dan tersebar hampir diseluruh Pusat Kota Malang.

Kemampuan PWBT untuk bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestik maupun pasar ekspor sangat ditentukan oleh dua kondisi utama yang perlu dipenuhi. *Pertama*, lingkungan internal PWBT harus kondusif, yang mencakup aspek kualitas SDM, penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, sistem manajemen, kultur/budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar dan tingkat kewirausahaan. *Kedua*, lingkungan eksternal harus juga kondusif yang terkait dengan kebijakan pemerintah, aspek hukum, kondisi persaingan pasar dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kondisi infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat serta perubahan ekonomi global. Selain dua kondisi tersebut, strategi pemberdayaan PWBT untuk dapat memasuki

pasar global menjadi sangat penting bagi terjaminnya kelangsungan hidup pedagang. Saat ini kondisi ini masih belum terbentuk untuk itu diperlukan upaya khusus dan sungguh-sungguh untuk menciptakan kondisi tersebut.

Oleh karena itu, upaya dalam menata dan mengelola PWBT menjadi tugas bersama antara pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat selaku pedagang PWBT. Dengan adanya kesadaran akan kepentingan bersama ini maka diharapkan PWBT dapat menjadi pilar utama yang tangguh dalam menggerakkan sektor riil, dan secara bertahap diharapkan pula dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Seperti yang telah diuraikan di depan bahwa PWBT mempunyai peran yang besar dalam perekonomian Kota Malang hal itu dapat dilihat dari jumlahnya yang sangat besar, berada di semua sektor perekonomian khususnya perdagangan, kemampuan menyerap tenaga kerja yang baik dan memberikan sumbangan terhadap PDB yang cukup besar. Melihat perannya yang cukup strategis tersebut maka sangatlah tepat jika dalam rangka meningkatkan pengembangan PWBT, pemerintah khususnya melalui Disbudpar melakukan penataan dan pengelolaan sebagai bentuk perhatian untuk pengembangan PWBT di kemudian hari agar tertata dan dapat menjadi objek wisata yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S selaku seksi pengelola data wisata Kota Malang di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata :

“ Sebagai Dinas yang diberikan wewenang untuk mengatur dan mengelola PWBT, kami harus berusaha semaksimal mungkin untuk menangani masalah-masalah yang mungkin timbul atau yang telah ada

untuk menciptakan sebuah iklim kondusif saat berdagang.”(wawancara tanggal 29 April 2014)

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai peran dan tindakan yang diambil Disbudpar dalam menata dan mengelola PWBT :

“ Tindakan yang selama ini kami lakukan untuk menata dan mengelola PWBT adalah melakukan koordinasi dengan ketua paguyuban PWBT. Selain itu kami juga bekerjasama dengan dinas koperasi dan UKM serta dinas pertamanan dan kebersihan Kota Malang. Hal ini kami lakukan agar setiap minggunya PWBT dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan” (wawancara tanggal 29 April 2014)

Menurut penjelasan beliau koordinasi yang dilakukan dengan ketua paguyuban PWBT untuk memastikan dan memantau setiap kegiatan dan perubahan anggota tetap yang tergabung dalam Ikatan Paguyuban Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (IPWBT) ikatan ini dibentuk agar lebih mempermudah dalam mendata setiap anggota dan pergantian yang terjadi setiap waktunya. Tetapi sayangnya koordinasi yang dilakukan oleh Disbudpar hanya sebatas itu saja dan cenderung tidak setiap minggu melakukan pemantauan, hal ini seperti yang disampaikan Bapak Dimiyati Suheru selaku ketua paguyuban IPWBT :

“Kami sebagai anggota IPWBT lebih banyak melakukan koordinasi sendiri dan melakukan penataan berdasarkan jenis dagangan dan pembagian kelompok masing-masing anggota. Pemerintah hanya memberikan anggota dari pihak keamanan untuk menjaga pintu masuk area PWBT saja untuk penataan semua dilakukan oleh pedagang sendiri” (wawancara tanggal 4 Mei 2014)

Ungkapan dari Ketua paguyuban PWBT di benarkan oleh Mbok Darmi sebagai salah satu anggota pedagang yang berjualan jeruk manis :

“Lho mas, ten mriki niku noto-noto dewe mulai bukak sampek engkok kukut, pemerintah paling nyedianne tendo wae sing dipasang dino sabtu”(Disini menata sendiri mulai dari awal buka sampai tutup, mungkin pemerintah hanya menyediakan tenda saja yang dipasang hari sabtu). (Wawancara tanggal 4 Mei)

Perbedaan pemahaman mengenai hal koordinasi penataan dan pengelolaan antara pedagang dan Disbudpar mengundang pertanyaan di benak peneliti mengenai kebenaran dari koordinasi yang dilakukan oleh dinas terkait. Untuk mendapatkan jawaban maka peneliti melakukan konfirmasi kembali kepada Kepala Disbudpar yaitu Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si yang mengatakan :

“Ya yang kami lakukan sebenarnya sudah sesuai prosedur mas, koordinasi sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Untuk permasalahan pedagang yang mengatakan kami tidak melakukan koordinasi dalam penataan dan pengelolaan itu karena kebanyakan dari para pedagang tidak mau diatur oleh Dinas kebudayaan dan Pariwisata selalu saja ada perbedaan dalam pola untuk mengatur para pedagang. Sehingga kami sepakat untuk menghormati keputusan mereka yang tidak mau ada campur tangan kami dalam pengaturan PWBT, untuk saat ini semua penataan dan pengelolaan PWBT sepenuhnya dilakukan para pedagang melalui ketua anggota masing-masing dan ketua paguyuban”(wawancara tanggal 6 Mei 2014)

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan :

“Agar tidak terkesan kami membiarkan mereka, maka kami selalu melakukan pemantauan walau tidak setiap minggu tetapi pemantau ini

terus berlanjut untuk mencegah terjadinya salah paham antara pedagang dan kami”(wawancara tanggal 6 Mei 2014)

Koordinasi dalam melakukan penataan dan pengelolaan merupakan hal penting yang memang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah iklim yang kondusif. Seperti yang telah dijelaskan kebutuhan untuk mengembangkan PWBT tidak hanya berdasarkan faktor internal saja tetapi faktor eksternal yang terkait dengan pihak-pihak lain dalam hal ini Pemerintah Kota Malang dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keterkaitan ini mau tidak mau menjadi faktor penting dalam pengembangan PWBT, interaksi yang dilakukan untuk menciptakan sebuah pengelolaan PWBT yang diinginkan merupakan kunci kemajuan dari PWBT sendiri.

Berbagai kepentingan dan permasalahan harus dapat diselesaikan secara seksama, dan menciptakan sebuah pola interaksi baru yang mendukung terbentuknya hubungan yang baik dan erat antara pedagang dan pemerintah sebagai naungan tempat mereka berjualan.

Selanjutnya terkait dengan koordinasi yang dilakukan Disbudpar kepada Dinas koperasi dan UKM serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Yang pertama koordinasi kepada Dinas koperasi dan UKM terkait dengan pertumbuhan jumlah pedagang dan potensi UKM yang mungkin dapat dikembangkan dan dipamerkan sebagai barang dagangan di PWBT. Menurut Ibu Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si koordinasi untuk memantau tingkat pertumbuhan sektor UKM sangat penting dan berpotensi sebagai trobosan untuk peningkatan kreatifitas para pedagang yang bergerak di sektor informal. Beliau juga

mengatakan:

“Kalau kita tidak memantau perkembangan sektor UKM melalui Dinas Koperasi, bisa-bisa potensi-potensi lokal terbuang sia-sia mas. Contohnya sekarang banyak sektor UKM yang memiliki kreatifitas tinggi dan dapat membuat kerajinan tangan dari olahan limbah seperti bonggol jagung dan lainnya. Ini kalo tidak mendapat perhatian maka potensinya tidak dapat maksimal kami hanya berusaha untuk membantu para pedagang berkembang dan mempunyai tempat yang layak untuk berjualan.” (wawancara tanggal 6 Mei 2014)

Menurut data Dinas koperasi dan UKM Kota Malang tingkat perkembangan usaha kecil dan menengah sangat signifikan dan berpotensi untuk melahirkan barang-barang olahan baru yang dapat digunakan sebagai barang dagangan yang memiliki nilai jual tinggi dengan tingkat biaya produksi yang rendah, hal ini terkait dengan kemampuan sektor informal untuk bersaing dengan sektor formal dan pedagang yang bergerak dalam skala besar. Untuk lebih memahami mengenai perkembangan usaha kecil menengah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 8. Perkembangan Usaha kecil Menengah yang Dibina

No	Uraian		2009	2010	2011	2012
1	Usaha kecil					
	a. Perdagangan	Unit	56	72	98	120
	b. Industri pertanian	Unit	21	13	32	18
	c. Industri Non pertanian	Unit	8	19	27	34
	d. Aneka Usaha	Unit	7	15	18	15
2	Usaha menengah					
	a. Perdagangan	Unit	8	14	19	20
	b. industri pertanian	Unit	9	15	11	18
	c. Industri non pertanian	Unit	11	13	9	15
	d. Aneka usaha	Unit	13	9	10	10
3	Perusahaan					
	a. Jumlah Perusahaan dagang besar	Unit	233	258	266	279
	b. Jumlah tenaga kerja	Orang	45.102	58.846	60.230	61.221

Sumber : Dinas koperasi dan UKM Kota Malang

Dari data dan pernyataan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa setiap

tahun jumlah UKM yang terdata dan dibina selalu mengalami perkembangan, dengan bertambahnya jumlah UKM di Kota Malang secara langsung juga menambah jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S yang mengatakan :

“Perkembangan jumlah UKM pasti juga akan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, sebagai contoh PWBT saja yang terdiri dari 459 dapat menyerap tenaga kerja hingga 918 orang. Itu bila setiap pedagang hanya beranggotakan 2 orang tetapi pada kenyataan setiap anggota pedagang beranggotakan ada yang lebih dari 2 orang” (wawancara tanggal 29 April 2014)

Terakhir terkait dengan koordinasi dengan dinas pertamanan dan kebersihan. Koordinasi yang dilakukan ini terkait dengan kontribusi kebersihan yang harus dibayar setiap pedagang untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan PWBT sendiri. Penuturan Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S mengenai hal ini adalah :

“ Setiap pedagang yang berjualan di PWBT dikenakan biaya sebesar 4.700 rupiah untuk kontribusi kebersihan dan pelestarian lingkungan sekitar, jumlah ini masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan mereka yang mencapai 1-2 juta setiap minggu”(wawancara 29 April 2014)

Kontribusi ini menurut para pedagang sebanding dan tidak terlalu membebani mereka untuk berjualan, pembayaran dilakukan setiap minggu ketika petugas kebersihan yang terkait berkeliling untuk menagih pembayaran yang ada. Kebersihan sendiri bagi PWBT merupakan hal penting dan pembeda dengan pasar-pasar tradisional lainnya yang bukan merupakan pasar wisata. Tempat yang

bersih dan nyaman juga menjadi faktor untuk menarik wisatawan datang ketempat tersebut.

1.3 Upaya Strategis yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Kota Malang Dalam Peningkatan Potensi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Berdasarkan studi dokumen dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait, dapat diketahui bahwa upaya strategis pengembangan PWBT Kota Malang merupakan program-program yang disusun bersama oleh beberapa dinas terkait. Selain itu terdapat beberapa program khusus perkuatan permodalan yang merupakan program dari pemerintah Kota Malang dengan anggaran APBD Kota Malang.

Untuk mengetahui upaya strategis pengembangan PWBT yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Dinas Koperasi dan UKM penulis menemui Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd selaku kepala Dinas Koperasi dan UKM. Dalam wawancara terkait upaya yang dikembangkan untuk peningkatan potensi PWBT beliau mengatakan :

“Strategi pengembangan UKM termasuk didalamnya PWBT dicanangkan oleh Dinas Koperasi dan UKM yang tertuang dalam Renstra. Hal ini dilakukan terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Malang. Umumnya kami ingin menciptakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh, mandiri, dan mempunyai daya saing yang tinggi”(wawancara 8 Mei 2014)

Kemudian dari studi dokumen dan observasi lapangan, dapat diintrepertasikan bahwa program yang selama ini dilakukan oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait untuk menciptakan UMKM yang tanggung dan mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi dalam hal ini termasuk juga PWBT, terbagi menjadi 2 program utama yaitu :

a. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pedagang

Strategi ini terkait dengan upuaya-upya dari pemerintah Kota Malang untuk dapat lebih dekat dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk dapat mengakses segala kebutuhan yang terkait dengan pengembangan usaha mereka. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan iklim yang kondusif ini yaitu (i) Peningkatan aksesibilitas pada permodalan, kita ketahui bahwa program pemerintah Kota malang selama ini untuk memperkuat struktur permodalan melalui pemberian bantuan hibah dan pinjaman lunak dengan dana bergulir yang selama ini masih belum banyak pedagang atau pengusaha yang memanfaatkan dan dinilai masih belum efektif.

(ii) Pelayanan kemudahan dalam perijinan, upaya untuk memberikan kemudahan pelayanan perijinan melalui program penanaman modal dengan kegiatan prosedur dan pelayanan terpadu satu atap (*one stop service*), yang telah diatur sejak tahun 2008 namun baru baru terlaksana di tahun 2008 akhir. Ternyata selama ini masih banyak pelaku usaha yang masih belum memiliki ijin, akses perijinan ini akan memudahkan para pelaku usaha untuk mendapat kemudahan dalam mendapatkan modal

pinjaman yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. PWBT sebagai salah satu program pengembangan UMKM yang cukup mendapatkan perhatian besar masih sering kali hanya bergantung kepada daftar dan pengaturan ijin yang diselenggarakan oleh Dinas perijinan dengan koordinasi ketua paguyuban.

(iii) Peningkatan infrastruktur pada layanan publik, upaya ini dilakukan karena selama ini PWBT dan para pelaku usaha khususnya UMKM masih berada di daerah-daerah yang dikatakan ruang publik dan merupakan daerah bebas perdagangan. Untuk itu perlu adanya peningkatan infrastruktur terkait fasilitas publik sebagai wadah mereka untuk menjalankan usahanya. Seperti yang terjadi di PWBT sejak awal pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan tempat usaha ini dengan menyediakan fasilitas tenda dan lingkungan yang dirasa merupakan pusat-pusat strategis di Kota Malang agar para pengunjung dapat nyaman untuk mengunjungi PWBT, walaupun pada kenyataannya PWBT sempat mengalami 4 kali relokasi dengan tempat yang kurang mendukung iklim usaha mereka.

b. Penguatan potensi

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang adalah dengan melakukan pembinaan dan pengembangan manajemen usaha. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang melakukan 2 hal yaitu (i) Pembinaan sumberdaya manusia, upaya yang

dilakukan Disbudpar untuk mengembangkan PWBT melalui pembinaan pelatihan dan penyuluhan tentang kewirausahaan dan manajerial tetapi hal ini masih dirasa belum efektif. Oleh karena itu perlu adanya regenerasi dan pembaharuan metode dalam melakukan pelatihan dan penyuluhan. Hal ini penting karena semakin lama Kota Malang akan menjadi Kota Metropolitan yang bersaing dengan dunia global dan perdagangan internasional, tentu saja bila hal ini terwujud PWBT akan menjadi salah satu *icon* Kota Malang sebagai bentuk tempat wisata sekaligus pengembangan UMKM.

(ii) Pembinaan dan pengembangan pasar, upaya ini terkait dengan penciptaan iklim persaingan dalam PWBT yang lebih sehat tidak ada dominasi atau monopoli terkait dengan PWBT atau pedagang. Untuk itu Disbudpar lebih sering untuk memantau dan mengembangkan jenis usaha yang ada agar tidak terjadi persaingan yang terlalu ketat antar pedagang, dengan adanya pengembangan jenis dagangan maka pengunjung pun akan lebih banyak memiliki pilihan dalam berbelanja.

c. Promosi

Promosi merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang untuk memperkenalkan PWBT sebagai pasar percontohan dan tempat wisata. Promosi yang dilakukan selama ini melalui selebaran dan media center Kota Malang, selain itu terkait dengan acara-acara Kota Malang yang terkait dengan kebudayaan dan pariwisata maka tidak jarang melibatkan PWBT sebagai lokasi untuk

acara tersebut. upaya promosi lain yang dilakukan adalah dengan memperkenalkan PWBT kepada kota-kota lain. Menurut Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S banyak kota-kota di Jawa Timur yang melakukan studi banding ke Kota Malang untuk mempelajari konsep wisata dan pengembangan UMKM biasanya, bersamaan dengan hal tersebut promosi juga dilakukan kepada peserta studi banding.

Promosi merupakan salah satu hal penting yang dilakukan untuk memperkenalkan PWBT ke kalangan luas tidak hanya terbatas pada Kota yang bersangkutan saja tetapi seperti beberapa negara di Asia promosi yang dilakukan dapat mencapai negara lain sebagai contoh Marina Bay di Singapura hampir seluruh dunia mengetahui tempat tersebut dan menjadi *icon* khusus negara Singapura. Ini sama halnya dengan PWBT ketika pemerintah serius untuk mengembangkan PWBT sebagai tempat wisata dan pengembangan UMKM maka tidak menutup kemungkinan akan dapat menjadi pasar percontohan yang tidak hanya membangun sosial masyarakat tetapi juga menciptakan kemandirian secara ekonomi di masyarakat.

2. Interaksi Antar Aktor Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

2.1 Kerjasama dalam pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara mengenai peran Disbudpar dalam penataan

dan pengelolaan PWBT, Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S telah menyebutkan terdapat koordinasi antara Disbudpar dengan dinas lain yang terkait dengan pengelolaan dan penataan PWBT seperti Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Koordinasi secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk kerjasama yang dijalin antar SKPD yang memiliki kepentingan yang sama atau memiliki tujuan yang saling terkait dalam Tugas Pokok dan Fungsi mereka di pemerintahan.

Kerjasama sendiri sangat dibutuhkan dalam mengembangkan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, baik kerjasama antar SKPD terkait dengan implementasi program yang sedang dijalankan maupun kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta sebagai pengembang dan pemilik modal. Dengan adanya kerjasama ini akan menciptakan sebuah hubungan yang baik dalam koordinasi, menangani masalah teknis, pengembangan, maupun penyelesaian terkait dengan tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh para pedagang PWBT.

Kerjasama dalam bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Disbudpar kepada dinas Koperasi dan UKM Kota Malang adalah koordinasi dalam hal pengembangan potensi pedagang yang telah mendapat pembinaan dan pinjaman modal dari Dinas Koperasi dan UKM. Hal ini dilakukan agar pedagang yang telah selesai dibina dapat mendapat tempat yang strategis untuk menerapkan hasil pembinaan dan pengembangan usahanya, dengan terciptanya hal ini maka pembinaan yang dilakukan oleh dinas Koperasi tidak hanya berhenti kepada pemberdayaan dan pinjaman modal usaha saja tetapi sampai kepada pemberian

fasilitas tempat berdagang yang layak dan strategis. Hal ini terkait dengan pernyataan Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S mengenai peran Disbudpar yaitu:

“.... kerjasama dengan dinas koperasi itu lebih kepada pengembangan pedagang serta penguatan potensi-potensi baru yang dimiliki oleh mereka...” (wawancara tanggal 29 April 2014).

Lebih lanjut dalam penuturan beliau mengatakan :

“.... ya kalau kita punya potensi usaha baru yang baik dari hasil pembinaan kita juga harus memberikan kesempatan usaha untuk mereka mas. Jadi semua koordinasi yang dilakukan itu mengarah kepada keuntungan bersama program yang dijalankan dinas koperasi berjalan, kita juga bisa mendapat potensi pedagang yang baik.”

Selain itu dengan bentuk kerjasama ini keuntungan tidak hanya sebatas terlaksananya program masing-masing dinas saja, tetapi juga pedagang yang menjadi obyek program mereka. Pedagang kecil selama ini berdagang di tempat-tempat umum yang merupakan daerah-daerah keramaian kota tanpa adanya penataan dan pengelolaan dari Pemerintah Kota Malang, dengan adanya hal ini pengembangan usaha pedagang kecil akan semakin mudah dan terkoordinasi dengan baik potensi yang besar dari usaha kreatif mereka dapat mendapatkan tempat yang layak untuk pengenalan maupun pengembangan usaha.

Dilain pihak hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesuksesan program yang dijalankan pemerintah dalam mengembangkan UMKM, permasalahan yang terjadi berdasarkan data terkait UMKM adalah masalah pengembangan dan perhatian pemerintah yang kurang baik. Melihat potensi UMKM Kota Malang

yang terus meningkat setiap tahunnya wajar bila pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terutama masalah pengembangan UMKM ini. Bentuk kesuksesan dalam pengembangan UMKM dapat berbentuk pembinaan yang memadai, pemberian modal usaha, serta penyediaan lapangan tempat usaha mereka berlangsung. Bila pengembangan UMKM hanya berhenti di pemberian modal usaha atau pinjaman modal usaha maka sama saja pemerintah belum tuntas dalam menyelesaikan masalah pengembangan UMKM karena akan percuma bila pedagang kecil yang telah mendapat pembinaan yang sangat baik dan modal yang cukup untuk menjalankan usaha mereka tetapi tidak memiliki tempat untuk menjalankan usaha atau tidak mendapat tempat usaha yang mampu bersaing dengan usaha-usaha besar lainnya, tetap saja mereka akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka dan pembinaan serta modal yang didapat menjadi sia-sia.

Terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh Disbudpar dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang terkait dengan hal kebersihan dan retribusi yang dibebankan kepada pedagang, kita mengetahui bahwa pada hakekatnya pasar atau tempat berjualan pedagang tidak lepas dari sisa-sisa hasil berjualan mereka yang menjadi sampah, untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lokasi PWBT maka koordinasi ini dilakukan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ratih Sulisty Handayani, ST, M.S yang mengatakan :

“....Hal ini kami lakukan agar setiap minggunya PWBT dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan” (wawancara tanggal 29 April 2014).

Kebersihan menjadi salah-satu faktor penentu dalam menarik pengunjung, dengan terjaganya kebersihan maka pengunjung datang ke PWBT akan nyaman dalam berbelanja di sana. Selain itu kebersihan ini juga terkait dengan salah satu visi Kota Malang yaitu Asri dengan menciptakan sebuah kondisi yang baik untuk berdagang keuntungan yang diperoleh bagi pedagang yang mendapatkan banyak pengunjung serta pengunjung yang nyaman dengan kondisi lingkungan yang tersedia.

Kerjasama yang dilakukan Disbudpar kepada masing-masing dinas terkait dengan pengembangan potensi PWBT sayangnya tidak diimbangi oleh kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemilih modal dan pengembang sebuah kota. Berdasarkan pernyataan Ibu Ratih Sulistyo Handayani, ST, M.S yang mengatakan:

“Kami memang tidak melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan PWBT karena menurut kami PWBT sudah tertata dengan baik tidak perlu ada pengembangan atau kerjasama dengan pihak swasta. Kerjasama dengan pihak swasta malah akan membebani pedagang sendiri karena mereka akan ditarik tarif sewa dan sebagainya”(wawancara 29 April 2014)

Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pedagang sendiri :

“Mungkin kami tidak melakukan kerjasama tetapi, bila mas Lingga ke PWBT banyak kok pedagang yang memiliki kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemasok bahan-bahan dagangan mereka khususnya mengenai kerajinan, pakaian, hiasan dan lain-lain kecuali masakan atau makanan jadi biasanya mereka memperoleh melalui pedagang lain atau petani secara langsung”(wawancara 29 April 2014)

Untuk mendapatkan kepastian bahwa adanya kerjasama untuk pengembangan PWBT peneliti kembali mewancarai salah satu pedagang di PWBT yaitu Ibu Anita yang berdagang kerajinan kaligrafi yang mengatakan :

“Iya mas saya dapat kaligrafinya dari pasuruan di sana ada produsennya, kebetulan ponakan saya jadi *salesnya* harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan disini. Belum lagi ada bonus klo membeli lebih dari 5”(wawancara tanggal 4 Mei 2014)

Hal ini juga dibenarkan oleh pedagang lain Mbak Silvi yang berjualan miniatur karakter animasi, yang mengatakan :

“Saya dapat barang-barang miniatur ini dari Surabaya mas, selain harga yang lebih murah kita dapat jadi agen mereka dan akan mendapat harga lebih murah lagi. Ya bisa dapat harga *kulak'an* mas kalo jadi agen seperti saya” (wawancara tanggal 4 Mei 2014)

Walaupun benar apa yang dikatakan Ibu Ratih Sulistyio Handayani, ST, M.S mengenai kerjasama yang dilakukan oleh pedagang dengan pihak lain, tetapi hal ini sangat disayangkan karena kerjasama antara pemerintah sendiri dengan pihak swasta tidak ada. Dengan alasan pedagang akan terkena tarif sewa dan lain sebagainya, merupakan alasan yang kurang tepat. Menurut berita di Koran Sindo omset yang dicapai di PWBT pernah mencapai 800 juta dalam sehari dan bekisar 450-550 juta rata-ratanya dengan jumlah omset yang tinggi ini mestinya pengembangan dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dapat dilakukan. Sebagai contoh di Pekalongan terdapat Sentra Batik Internasional

(SBI), SBI merupakan tempat berkumpulnya semua pedagang baik dari Pekalongan sendiri maupun Kota Semarang dan Tegal dimana mereka menjual beraneka macam jenis Batik. Tempat yang mereka pakai merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Pekalongan dengan Pihak swasta sebagai pengembang pusat perbelanjaan kota tersebut.

Permasalahan bukan terletak kepada uang sewa atau pungutan yang akan dibayar oleh pedagang kepada pihak swasta sebagai pengembang, permasalahan lebih kepada *bergaining power* yang dimiliki pemerintah terhadap pihak swasta selama pemerintah memiliki kekuatan tersebut maka segala sesuatunya akan diatur berdasarkan kontrak kerja yang disepakati bersama sehingga pedagang juga akan mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut. Dengan adanya hal ini dirasa masalah uang sewa tidak akan menjadi permasalahan melihat potensi yang besar juga dari PWBT.

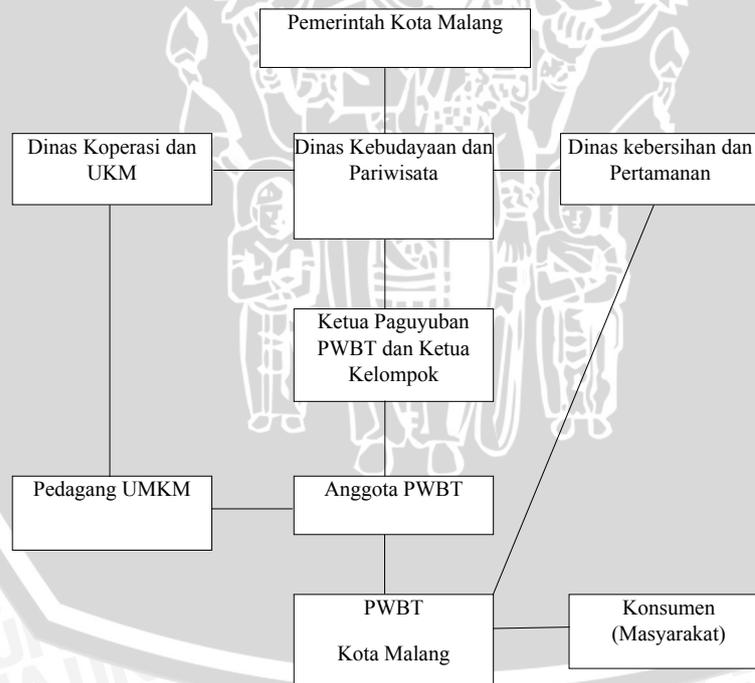
Kerjasama dengan pihak swasta akan juga meningkatkan nilai prestis dari PWBT yang kemungkinan akan menjadi tempat tujuan wisata setiap minggu, mengingat bahwa pemerintah juga menerapkan *car freeday* di jalan ijen yang berdekatan dengan PWBT. semakin banyak pengunjung dan kegiatan di acara *car freeday* tersebut akan semakin banyak pula masyarakat yang datang untuk berbelanja di PWBT minimal untuk membeli makan dan minum.

2.2 Peran Masing-Masing *Stakeholder* Dan Keterlibatan Publik

Untuk dapat mengetahui peran masing-masing *stakeholder* dan keterlibatan publik maka diperlukan analisis mengenai pembagian *stakeholder*

yang memiliki peran terhadap PWBT. Analisis *stakeholder* didasarkan atas mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor yang terlibat secara langsung dalam PWBT. Mekanisme adalah cara atau prosedur urutan tentang bagaimana suatu kegiatan atau program dijalankan, dan dalam konteks penataan dan pengelolaan PWBT ini mekanisme yang dimaksudkan adalah mekanisme kerja masing-masing aktor yang terlibat. Untuk memperjelas identifikasi ini dapat dilihat dari gambar sebagai berikut :

Gambar. 10 Identifikasi Aktor-Aktor dalam PWBT



Berdasarkan gambar indentifikasi tersebut maka aktor yang terlibat dibedakan atas pihak pemerintah dan pedagang sebagai subjek dari PWBT serta masyarakat sebagai pendukung keberlangsungan dan konsumen PWBT, tidak

adanya peran swasta dalam hal ini dikarenakan peran swasta tidak secara langsung berpengaruh dan berhubungan dengan pemerintah maupun pedagang dalam pengembangan peran swasta hanya sebagai pemasok atau produsen dari barang-barang yang dijual oleh pedagang.

Dari pihak pemerintah yang terkait dengan pengembangan serta penataan dan pengelolaan PWBT terdapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang. Dari pedagang terwakili oleh Ketua paguyuban PWBT dan ketua kelompok masing-masing anggota sedangkan dari masyarakat sebagai konsumen. Dari pembagian sederhana tersebut dapat dijelaskan peran-peran masing-masing sebagai berikut :

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sebagaimana dijelaskan di awal peran dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah sangat jelas yaitu melakukan koordinasi dengan para pedagang, menciptakan iklim yang kondusif melalui berbagai upaya, menguatkan potensi lokal melalui pendidikan dan pelatihan, dan melakukan promosi untuk pengembangan PWBT.

Selain itu masih ada peran lain yang dilakukan, sebagai dinas yang ditunjuk untuk menata dan mengelola PWBT. Peran itu adalah sebagai mediator memang hal ini tidak selalu dilakukan tetapi ada saat-saat tertentu Disbudpar menjadi mediator bagi para pedagang sebagai contoh saat terjadinya relokasi adanya *hearing* bersama pedagang mengenai relokasi dan tujuan dari relokasi tersebut.

Secara tidak langsung proses *hearing* ini menempatkan Disbudpar

sebagai mediator mereka dan menampung semua permasalahan dan keinginan mereka mengenai relokasi, tetapi sayangnya relokasi dan proses *hearing* masing kurang efektif dan dirasa tidak memberikan perubahan bagi permasalahan-permasalahan selama proses relokasi tersebut. Dilain pihak proses ini juga merupakan trobosan bagi Disbudpar untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang menyangkut perkembangan dari PWBT itu sendiri.

b. Dinas Koperasi dan UKM

Dinas ini memiliki peran dalam mengembangkan UKM secara keseluruhan termasuk PWBT dimana usaha yang dilakukan lebih kepada melakukan pembinaan dan permodalan kepada mereka yang membutuhkan untuk dapat tetap bersaing baik secara intern dengan pedagang lain maupun ektern dengan dunia luar.

Peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM ini tidak lain sebagai *support* terhadap perkembangan sektor informal yang ada, sebagaimana data yang telah dijelaskan diawal potensi perdagangan baik sektor informal maupun formal menjadi sektor unggulan Kota Malang yang dapat memberikan sumbangsi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Peran yang tidak kalah penting yang dilakukan oleh dinas ini adalah melakukan pendataan para pelaku usaha dan pertumbuhannya. Hal ini merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui tingkat

pertumbuhan dan perkembangan kemajuan dari sektor UKM itu sendiri, disamping untuk melihat potensi-potensi baru yang dapat dijadikan sebagai komoditi ekspor di Kota Malang.

c. Dinas Pertamanan dan Kebersihan

Dinas ini memiliki peran sebagai pengelola kebersihan tentunya. Sebagaimana dijelaskan di atas pengelolaan atas kebersihan dan kualitas lingkungan tempat PWBT berada menjadi tanggung jawab dinas ini walau sebenarnya tugas menjaga kebersihan bukan hanya tugas dari dinas terkait tetapi juga merupakan tugas bersama termasuk di dalamnya para pedagang dan pengunjung PWBT.

d. Ketua Paguyuban PWBT

Peran dari ketua paguyuban adalah sebagai perwakilan mereka dalam menyampaikan permasalahan dan mengkoordinasi penataan dan pembagian kelompok dari masing-masing anggota. Selain itu peran khusus dari seorang ketua adalah selalu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan PWBT kepada instansi dan dinas terkait, agar mendapatkan dukungan dan persetujuan.

Selain itu peran dari ketua paguyuban adalah mendata setiap anggota PWBT yang berjumlah 459, kemudian juga melakukan perubahan dan pelaporan data anggota setiap terjadi perubahan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar setiap pedagang yang tergabung dalam IPWBT mendapatkan hak-hak mereka secara tetap seperti lapak dan tenda, kemudian kebersihan tempat berjualan.

e. Masyarakat

Sebagai konsumen dan pengunjung dari PWBT peran masyarakat dirasa sangat besar pula dan berpengaruh bagi perkembangan dan penyebaran PWBT sendiri. Peran masyarakat adalah sebagai pengawas dan agen media tidak resmi dari PWBT, yang dimaksudkan pengawas adalah sebagai pengunjung masyarakat berhak juga mengadukan pedagang yang berjualan di PWBT tidak dengan etiket baik atau sembarangan atau bahkan melakukan kecurangan seperti mengambil keuntungan melalui barang dagangannya atau melakukan penipuan terhadap konsumen.

Sedangkan yang disebut dengan agen media tidak resmi adalah masyarakat berperan dalam menyebarkan keberadaan PWBT kepada masyarakat lain, sebagai contoh mahasiswa. Belakangan ini universitas-universitas di Malang banyak kedatangan dari mahasiswa luar daerah yang nota bene tidak mengetahui keberadaan PWBT sebagai mahasiswa lokal sedikit banyak akan memberitau bahwa setiap minggu ada PWBT yang merupakan tempat wisata gratis sembari menikmati program *car freeday* Kota Malang. Hal ini memang dirasa tidak terjadi tetapi pada kenyataannya para pendatang dari luar daerah mengetahui adanya PWBT dari teman-teman mereka yang merupakan warga Kota Malang.

Secara tidak langsung masyarakat juga berperan dalam promosi PWBT sebagai pusat wisata dan perdagangan Kota Malang, pola promosi ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Disbudpar tetapi tujuan yang ingin dicapai tetap sama yaitu memperkenalkan PWBT. cara ini dirasa

lebih efektif dibandingkan dengan melalui selebaran atau pamflet yang dipasang di jalan-jalan.

2.3 Hambatan Dalam Proses Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata

Belanja Tugu Kota Malang

Dalam proses penataan dan pengelolaan PWBT tidak terlepas dari hambatan yang menjadi tantangan dari berbagai pihak. Hambatan ini sendiri merupakan hasil dari interaksi dan hubungan selama proses penataan dan pengelolaan yang dilakukan baik dari dinas terkait dan pemerintahan Kota Malang umumnya serta para pedagang yang diatur dalam IPWBT. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si beliau mengatakan bahwa :

“Soal hambatan banyak mas, macam-macam permintaan pedagangnya mulai dari A-Z. Terkadang banyak hal yang tidak perlu dipermasalahkan tetapi tetap jadi masalah dan berdampak pada kami juga” (wawancara tanggal 6 Mei 2014)

Lebih lanjut Beliau juga menjelaskan mengenai hambatan yang sering terjadi di PWBT :

“Masalah yang menjadi hambatan paling sering adalah keinginan para pedagang untuk menambah jumlah anggota dan membuka lahan baru, ya istilahnya membuka cabang bagi pedagang atau anggota baru. Sebenarnya keinginan mereka cukup rasional tetapi lahan yang disediakan pemerintah saat ini sangat terbatas dan tidak mungkin juga untuk menambah jumlah anggota dengan lahan yang terbatas.”(wawancara 6 Mei 2014)

Dua pokok permasalahan tersebut memang dirasa merupakan permasalahan yang cukup penting jika dijadikan sebagai isu kebijakan, pasalnya setiap minggu jumlah pedagang yang berjualan di PWBT dapat mencapai 900an pedagang yang diantaranya 459 pedagang resmi yang menjadi anggota IPWBT tetapi yang lainnya adalah pedagang tidak resmi yang memiliki potensi hampir sama dengan pedagang PWBT. hal ini dapat dilihat dari dagangan yang dibawa oleh pedagang tersebut tidak kalah menarik dan unik bila dibandingkan dengan pedagang di PWBT bahkan terlihat beberapa pedagang memiliki barang-barang unik yang memiliki nilai jual tinggi seperti tas multi-fungsi dimana tas ini berukuran sangat kecil tetapi ketika dibuka dapat memuat 2 jaket berukuran dewasa, selain itu tas ini dapat dijadikan tas pinggang serta topi juga.

Selain itu juga terdapat pedagang bantal angin yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk kegiatan *indoor* atau *outdoor* dengan harga yang sangat murah karena merka memproduksi sendiri dengan bahan-bahan lokal. Potensi-potensi yang cukup besar ini sayang sekali bila tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan PWBT menjadi lebih besar lagi atau paling tidak membuka cabang seperti yang diinginkan oleh para pedagang. Bila melihat kondisi dan iklim yang baik dapat diciptakan untuk PWBT sekarang ini maka, dengan yakin cabang yang mungkin akan terbentuk nantinya akan mendapat perhatian yang cukup besar sama halnya dengan PWBT sekarang ini.

Untuk memastikan hal tersebut peneliti telah melakukan wawancara pribadi terhadap salah satu pedagang yaitu Pak Sobiri, beliau mengatakan :

“*Aku dewe yow pengen mas oleh tempat dodolan sing luwih apik,*

opo lek gag ngono iso dikelola koyok pasar minggu iku. Lak sak iki aku mbek arek-arek iku dodolan nang kono yow wes sak onok'e ae didasar nang dalam ganok terpal utowo tendone. Lek onok fasilitas koyok pasar minggu pelanggan bakal enak tho ndelok-ndelok gag usah panas-panas”(Saya juga mau tempat yang lebih bagus, seperti pasar minggu. Sekarang saya dan teman-teman berjualan seadanya di pinggir jalan, kalau ada fasilitas yang bagus seperti pasar minggu pelanggan akan lebih nyaman tidak perlu panas-panasan.). (Wawancara 11 Mei 2014)

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Siti salah satu pedagang tidak resmi yang berjualan roti goreng, dengan mengatakan :

“Waduh mas sakjane niku kulo pun nggaduh pelanggan katah, tapi kadang yow gag enak pisan ambek sing liyane perkorone lahan sing tak gawe dodolan niku halaman omah'e pejabat. Yow harapane lek pemerintah iso nyediakke lahan sing apik lan akeh pengunjunge koyok pasar minggu”(Sebenarnya saya sudah mempunyai banyak pelanggan tapi tidak enak dengan yang lainnya karena berjualan di halaman pejabat. Harapan saya bisa dapat tempat seperti pasar minggu). (Wawancara 11 Mei 2014)

Hambatan yang dialami oleh para pedagang ini masih lebih baik dibandingkan dengan masalah-masalah lain yang sering terjadi terkait dengan pengembangan UMKM seperti permasalahan modal, kemampuan usaha, pemahaman dan manajemen. Dengan kata lain masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kota Malang saat ini merupakan masalah teknis dari penataan dan pengelolaan yang dilakukan selama ini. Melihat para pedagang yang tidak mengeluhkan soal modal, sewa lahan atau kontribusi kebersihan sebesar 4.700 rupiah maka dapat dikatakan usaha yang selama ini dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam memberikan pendidikan dan pelatihan akan kewirausahaan kepada UKM membuahkan hasil yang cukup positif. Selama peneliti melakukan wawancara terkait dengan masalah yang dihadapi dalam berdagang tidak ada

pedagang yang mengeluhkan soal modal dan biaya usaha ataupun pungutan yang berlebihan semua rata-rata mengeluhkan tempat dan lahan yang memadai untuk pengelolaan PWBT dan pedagang sekitarnya.

C. Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Kota Malang Mengenai Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

1.1 Pelipham Wewenang Pengelolaan Dan Penataan Kepada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang

Pelimpahan wewenang terkait dengan penataan dan pengelolaan merupakan cara yang dilakukan untuk menyerahkan kewenangan terkait kebijakan yang mengatur segala macam tindakan dan proses berlangsungnya implementasi kebijakan. Dalam kasus PWBT kebijakan penataan dan pengelolaan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelimpahan sebuah kebijakan kepada dinas terkait dengan implementasi kebijakan publik tidak dapat serta merta dilakukan tanpa ada alur yang jelas dan isu yang diangkat melalui permasalahan publik.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye dalam Widodo (2012:16) proses kebijakan publik harus terdapat indentifikasi masalah,

penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan kemudian evaluasi kebijakan. Bila melihat dari sejarah berdirinya PWBT maka pemerintah telah mendapatkan isu terkait dengan kebijakan yaitu permasalahan lapangan kerja dan pengangguran yang cukup tinggi pasca PHK yang dilakukan beberapa perusahaan yang gulung tikar. Berawal dari isu ini kemudian menjadi agenda kebijakan pemerintah yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kebijakan melalui SK walikota nomor 213 tahun 2005. Dalam Sk walikota tersebut diatur mengenai mekanisme pembentukan PWBT menjadi tempat atau sentra pengembangan UMKM untuk memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya dalam proses implementasinya eksekutor dari peraturan yang telah dibuat tersebut diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta beberapa dinas terkait untuk melakukan penataan dan pengelolaan PWBT. Dari hal ini sudah jelas bahwa PWBT memiliki landasan yang jelas dan diatur sesuai dengan peraturan yang semestinya.

Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah semestinya sebagai dinas yang ditunjuk untuk melaksanakan penataan dan pengelolaan PWBT melakukan trobosan-trobosan baru sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menciptakan PWBT yang diinginkan. Sesuai dengan visi dan misi Kota Malang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan PWBT yang tercermin dalam visi tersebut. Walau tidak kalah penting adalah menciptakan hubungan yang baik antara pemerintah sebagai pengayom dan jembatan para pedagang untuk dapat lebih dekat dan menjadikan pemerintah sebagai *partner* mereka dalam berdagang.

1.2 Tindakan Dan Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Kota Malang mempunyai potensi Usaha mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat besar salah satunya melalui PWBT. Potensi yang besar ini dapat dilihat dari jumlah perkembangan UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya, tentu saja peningkatan jumlah UMKM ini menunjukkan juga peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor informal. Jumlah perkembangan yang setiap tahun meningkat ini pada akhirnya juga akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan ekonomi daerah. Sesuai dengan hasil LQ yang dilakukan oleh BPS Kota Malang Sektor perdagangan merupakan salah satu potensi yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan Kota Malang untuk dapat bersaing dengan sektor-sektor lain dan memberikan sumbangsi terhadap perkembangan perekonomian daerah. Melihat potensi dan peran yang cukup strategis maka tidak salah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM.

Pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah sewajarnya membantu membangun atau mengembangkan potensi tersebut agar bisa tumbuh dan berkembang lebih baik. Pengembangan PWBT yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan pembangunan fasilitas atau wadah untuk berjualan diharapkan akan memberikan dampak yang lebih baik dan pertumbuhan yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Cornelis dan Miar (2005) mengenai konsep pemberdayaan, yang mengatakan bahwa salah satu strategi dalam pemberdayaan adalah memberdayakan sektor

ekonomi lapisan masyarakat yang masih tertinggal. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa pemberdayaan yang dilakukan dapat berbentuk penyediaan lapangan usaha, modal atau segala akses yang terkait dengan kebutuhan dalam pengembangan iklim usaha masyarakat kecil.

Harapan potensi PWBT di Kota Malang ini bisa dikembangkan agar lebih maju serta menjadi penggerak perekonomian daerah dan dapat meningkatkan perekonomian rakyat. Disamping keberadaannya dapat mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapatan daerah juga merupakan aset atau kekayaan daerah bagi Kota Malang.

Untuk itu tindakan dan peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penataan dan pengelolaan PWBT. Tindakan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah lebih kearah koordinasi dan kerjasama antar dinas terkait serta ketua paguyuban PWBT untuk menciptakan ketertiban di PWBT. Kemampuan Disbudpar dalam melakukan koordinasi dengan berbagai dinas dan pedagang menjadi salah satu elemen penting dalam melakukan penataan dan pengelolaan. Sebagaimana yang telah diuraikan diawal koordinasi yang dilakukan antara Disbudpar dan pedagang masih dirasa kurang efektif, kecenderungan pedagang yang lebih percaya terhadap ketua paguyuban dan ketua kelompok menandakan masih kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Disbudpar terkait dengan penataan dan pengelolaan di lapangan. Tetapi dilain pihak koordinasi dan kerjasama yang dilakukan Disbudpar dengan dinas lain yang terkait menunjukkan nilai positif hampir semua berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Nugroho (2012) ada dominasi aktor yang terlibat dalam sebuah implementasi kebijakan. Kurang efektifnya koordinasi yang dilakukan Disbudpar dengan pihak ketua paguyuban PWBT dan ketua kelompok dan efektifnya kerjasama yang dilakukan Disbudpar dengan dinas lainnya menunjukkan bahwa dominasi atau pola koordinasi yang selama ini dijalankan masih berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah sebagai aktor utama. Nugroho (2012:688) menjelaskan pemerintah sebagai aktor utama masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Bila posisi seperti yang dijelaskan oleh Nugroho maka tentu saja *bergaining power* yang sangat besar terletak pada pemerintah dalam hal ini Disbudpar yang melakukan koordinasi secara langsung, pemerintah berusaha mengarahkan pedagang sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan efisien dalam menjalankan PWBT.

Menjadi hal yang sangat penting ketika dinas-dinas yang berperan dalam penataan dan pengelolaan PWBT mengetahui kelemahan dan kekuarangan dari koordinasi yang dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi parapedagang. Hal ini terkait dengan permasalahan yang mungkin akan muncul dikemudian hari, ketika hubungan antara dinas dan pedagang masih kurang efektif dan renggang maka kepercayaan pedagang terhadap dinas pun akan sangat rendah yang akan berakibat terhadap konflik terhadap kebijakan baru yang mungkin akan diberlakukan kedepannya. Sebagai contoh kebijakan untuk merelokasi para pedagang tingkat kepercayaan yang rendah terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat para pedagang seringkali bersikeras untuk tidak mau direlokasi dengan berbagai alasan. Hal ini akan berbeda bila tingkat kepercayaan

pedagang sangat tinggi terhadap dinas maupun pemerintah kota, seperti yang terjadi di Solo kemampuan Pemerintah Kota Solo untuk merelokasi para pedagang ydan menempatkan mereka di satu wilayah kusus tanpa adanya permasalahan dan konflik merupakan bukti bahwa kepercayaan para pedagang sangat tinggi. Mereka meyakini bahwa relokasi yang dilakukan akan memberikan dampak yang lebih baik bagi iklim usaha mereka.

Permasalahan yang tidak bergejolak dan menciptakan sikap anti pemerintah seperti pada kasus tingkat kepercayaan pedagang PWBT bukan berarti menunjukkan ini merupakan masalah yang tidak penting, justru sebaliknya permasalahan kecil yang terus-menerus tertentuk akan menjadi permasalahan besar nantinya ini sama halnya dengan teori *snow ball* yang terus bergulir hingga akhir membentuk kesimpulan. Sama halnya dengan permasalahan yang terus-menerus dibiarkan dan menjadi penyakit di masyarakat akan semakin memperburuk citra pemerintah dimata para pedagang. Setidaknya harus ada upaya dari Disbudpar untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan menyerahkan penataan dan pengelolaan kepada ketua paguyuban untuk menghormati keputusan mereka yang tidak ingin ada campur tangan dari pihak lain seperti yang dikatakan oleh Ibu Dra. Sri Wahyuningtyas, M.Si selaku kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Menghormati keinginan pedagang memang sangat penting tetapi bukan berarti membiarkan mereka melakukan penataan dan pengelolaan sesuai dengan keinginan mereka. Pemerintah Kota Malang sebagai wadah yang membentuk mereka juga harus memiliki peran yang jelas dalam penataan dan pengelolaan, agar kedepannya interaksi yang terjadi dalam hal tersebut akan

menciptakan hubungan yang baik diantara pemerintah dan para pedagang.

1.3 Upaya Stategis Yang Dikembangkan Oleh Pemerintah Kota Malang Dalam Peningkatan Potensi Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Terkait dengan potensi yang telah dijelaskan, rasanya tidak cukup bila Pemerintah Kota Malang melalui dinas-dinasnya hanya melakukan tindakan dalam penataan dan pengelolaan saja tetapi harus ada upaya-upaya strategis lain yang dilakukan untuk mengembangkan PWBT. Upaya strategis ini terkait dengan tindakan pemerintah untuk dapat membangun PWBT tidak hanya sebagai tempat wisata dan pengembangan UMKM Kota Malang tetapi juga tindakan pemerintah untuk menguatkan PWBT baik intern maupun ekstern.

Melihat upaya strategis yang dilakukan untuk pengembangan PWBT, lebih mengarah kepada pembangunan manusia dalam hal ini para pedagang yang tergabung dalam anggota PWBT, penciptaan lingkungan kondusif yang mendukung iklim usaha para pedagang dan promosi untuk memperkenalkan PWBT kepada kalangan yang lebih luas termasuk kepada kota-kota lain diluar Kota Malang.

Pembangunan manusia atau dengan kata lain pemberdayaan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. Menurut Charles Elliot dalam Priyono,et.al (1996:18) pemberdayaan akan berjalan dengan baik bila

pemberdayaan dilakukan atas dasar pendekatan *The development approach*. *development approach* sendiri merupakan pendekatan pemberdayaan yang mengatakan pemberdayaan harus ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemampuan, dan keswadayaan masyarakat. Bila melihat hal yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian pendidikan dan pemahaman pedagang mengenai kewirausahaan dan manajemen dalam pengelolaan usaha mereka dapat dikatakan sebagai sebuah pemberdayaan, untuk dapat meningkatkan daya saing pedagang lokal terhadap persaingan perdagangan secara global. Hal ini didukung dengan penciptaan iklim yang kondusif dimana faktor lingkungan yang menjadi faktor yang paling banyak mempengaruhi kondisi pedagang harus juga diperhatikan pemerintah, Cornelis dan Miar (2005) mengatakan bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu faktor penentu dalam perkembangan iklim usaha untuk itu dalam pemberdayaan diperlukan iklim yang kondusif yang mendukung terciptanya lingkungan ekonomi yang stabil. Penciptaan iklim yang baik bagi pedagang juga akan membantu mereka dalam mengembangkan usaha mereka atau paling tidak akan muncul kreatifitas-kreatifitas baru terkait dengan dengan barang yang diperjualbelikan di PWBT.

Terakhir terkait dengan promosi, bila kondisi pedagang sudah siap untuk bersaing secara global dan kondisi lingkungan mereka mendukung untuk terciptanya iklim usaha yang baik dan kondusif maka promosi yang dilakukan akan sangat berperan penting untuk menyebarluaskan keberadaan PWBT itu sendiri, dengan semakin terkenalnya PWBT akan membawa dampak terhadap wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang tertarik untuk berkunjung.

Kunjungan-kunjungan yang dilakukan baik sebagai studi banding atau berwisata sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi dari PWBT itu sendiri. Kemungkinan terbaik yang akan didapat oleh PWBT adalah terbentuknya *Image* PWBT sebagai *Icon* Kota Malang dalam mengembangkan UMKM berbasis wisata, bila hal ini dapat dicapai maka Kota Malang yang didaulat sebagai kota wisata akan menarik pengunjung-pengunjung baru untuk berbelanja di PWBT.

Upaya-upaya strategis yang berkembang ini merupakan jalan dan jembatan bagi PWBT untuk lebih berkembang lagi, mungkin tidak hanya sebatas sebagai pasar wisata saja tetapi juga sebagai pasar percontohan yang dapat menularkan tren positif bagi kota-kota lain yang ingin mengembangkan UMKM. Semakin baik perkembangan UMKM maka akan semakin baik pula kondisi perekonomian baik daerah maupun perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat melalui perkembangan UMKM akan kembali berdampak kepada penyerapan tenaga kerja dan penyelesaian masalah lapangan pekerjaan. Ini merupakan sebuah siklus perputaran yang positif dan dapat dikembangkan oleh berbagai kota di Indonesia yang memiliki sektor unggulan yang sama seperti Kota Malang. Tetapi perlu diingat juga bahwa tingkat keberhasilan perkembangan UMKM tidak dapat diraih dengan sekejap saja tetapi perlu adanya upaya-upaya strategis yang dikembangkan serta trobosan-troboan baru yang mendukung UMKM itu sendiri.

2. Interaksi Antar Aktor Dalam Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

2.1 Kerjasama Dalam Pengembangan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota

Malang

Kerjasama merupakan sebuah elemen penting yang harus dimiliki oleh pemerintah untuk mengembangkan sebuah program yang terkait baik masyarakat maupun potensi daerah. Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan pernah dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama, kerjasama ini menjadi kunci keberhasilan sebuah kebijakan melalui interaksi antar aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Untuk itu kerjasama dan koordinasi yang baik antar aktor, akan membawa keadaan yang sinergi untuk mendukung terciptanya kelancaran dalam implementasi kebijakan. Purwanto (2012 : 153) menambahkan agar koordinasi dapat dilakukan dengan baik maka seluruh *stakeholder*, terutama penanggung jawab implementasi, perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam implementasi. Ketika sinergitas tersebut telah terbentuk dan implementasi berjalan dengan baik maka hal ini akan meminimalkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah-masalah teknis karena semua telah ditata dan dikelola secara bersama-sama.

Melihat dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan PWBT, kerjasama lebih kepada bagaimana pemerintah melalui dinas-dinas terkait untuk mengembangkan PWBT tanpa melibatkan pihak lain selain mereka. Sehingga kerjasama yang terbentuk adalah kerjasama antar SKPD yang terkait dalam penataan dan pengelolaan PWBT, bila melihat dari bentuk mekanisme kerja yang dimiliki oleh Disbudpar maka kerjasama yang terjalin

memiliki mekanisme kerja timbal balik (*reciprocal*). Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Purwanto (2012 : 155-159) bahwa salah satu mekanisme interaksi antar *stakeholder* berupa mekanisme timbal balik (*reciprocal*), dimana sebuah implementasi kebijakan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaannya dan menyerahkan kelompok sasaran kepada satu aktor pada saat eksekusi terakhir dari sebuah kebijakan. Pola interaksi yang terjadi dalam mekanisme ini adalah masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi akan menghasilkan *output* yang nantinya akan menjadi *input* kepada aktor lainnya.

Interaksi yang dihasilkan melalui kerjasama antar dinas dalam mengembangkan PWBT menciptakan *input* dan *output* untuk masing-masing peran yang dijalankan oleh dinas tersebut. Sebagai contoh kerjasama antara Disbudpar dengan Dinas Koperasi, peran dinas koperasi dalam melakukan pembinaan dan menghasilkan potensi-potensi usaha baru dalam UMKM akan menjadi input bagi Disbudpar dalam menentukan lokasi usaha dan pengembangan usaha yang mampu memiliki daya saing yang lebih baik, sebaliknya kekurangan dan keluhan pedagang di PWBT menjadi input bagi Dinas Koperasi agar dapat dilakukan pembinaan atau pemberian pinjaman modal usaha agar keberlangsungan proses usaha tetap ada. Terakhir nantinya Disbudpar sebagai aktor yang berperan langsung untuk menjalankan semua bentuk kerjasama yang telah dilakukan dengan cara melakukan koordinasi dengan ketua Paguyuban dan ketua-ketua kelompok yang ada di PWBT.

Tetapi sayangnya kerjasama yang telah baik ini tidak dibarengi dengan kerjasama dengan pihak swasta sebagai pemilik modal dan penyumbang

pembangunan kota. Kekawatiran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan PWBT, tidak memiliki landasan yang jelas. Selama alasan yang dikemukakan karena uang sewa dan pungutan yang nantinya harus dibayarkan pedagang terhadap pihak swasta sebagai pengembang akan menjadi hambatan bagi pengembangan PWBT selanjutnya. Pentingnya pemahaman dinas akan potensi yang lebih besar melalui kerjasama dengan pihak lain akan membawa PWBT pada *level* yang lebih tinggi tidak hanya sekedar pasar wisata bahkan akan dapat menjadi sentra pasar wisata internasional seperti Sentra Batik Internasional di Kota Pekalongan yang dimulai dari pengembangan UMKM sama seperti Kota Malang. Selain itu melihat dari potensi yang terus berkembang dari UMKM di Kota Malang, tidak selamanya pola kerjasama yang diusung ini akan berjalan efektif terus-menerus pasalnya menurut Crosby (1992) dikutip oleh Iqbal (2007) aktor implementasi kebijakan perlu adanya *secondary stakeholder* atau pemangku kepentingan penunjang yang dapat menjadi perantara sekaligus *support* dalam berbagai kegiatan pengembangan seperti penyandang dana, pelaksana koordinasi, dan pengawar serta advokasi. Pergerakan yang dinamis dari perkembangan UMKM setiap tahun seperti data yang telah tersajikan, lambat laun akan memberikan tuntutan baru kepada pemerintah untuk merubah PWBT *level* ke yang lebih tinggi lagi.

Bagi para pedagang yang menjadi salah satu dari elemen kerjasama tersebut harus mampu memberikan perbedaan dan masukan bagi pemerintah terhadap perubahan-perubahan melalui kerjasama dengan pihak swasta sebagai pengembang PWBT. Selama pedagang hanya mengikuti proses yang ada maka

keterhambatan perkembangan PWBT akan semakin nyata terlihat, pedagang hanya melakukan kerjasama secara perseorangan dengan pihak lain terkait dengan barang-barang dagangan mereka tetapi belum sampai memanfaatkan pihak swasta untuk dapat memberikan sumbangsi bagi keberlanjutan pengembangan PWBT.

Kerjasama tidak hanya dilakukan dengan pihak swasta saja sebagai pengembang dan pemilik modal. Kerjasama juga dapat dilakukan dengan masyarakat sebagai konsumen dari PWBT itu sendiri, kerjasama dapat berbentuk penyediaan lahan untuk acara yang mungkin akan dilakukan oleh masyarakat dengan mengikut sertakan PWBT sebagai pendukungnya. Untuk lebih memperjelas, sebagai contoh *event* pameran kaos dan distro yang sering diselenggarakan oleh masyarakat yang tergabung dalam pengusaha distro Kota Malang. Bila saja pameran ini dapat melibatkan PWBT yang mungkin akan bertajuk tidak hanya pameran saja tetapi wisata pengunjung akan lebih tertarik lagi dan akan mendapatkan animo yang besar ketika ada pameran yang disertai dengan wisata. Bagaikan mendapatkan 2 hal dalam sekali pameran, hal ini penting untuk dapat menggandeng masyarakat yang memiliki tingkat kreatifitas yang cukup tinggi dalam pengembangan usaha mereka atau acara-acara yang terkait dengan sosial.

Contoh lain yang dapat menjadi kerjasama positif antara pemerintah dan masyarakat adalah acara musik dan donor darah, banyaknya pengunjung yang berdatangan ke PWBT menjadi potensi tersendiri untuk mengadakan acara music dan donor darah sembari dapat menikmati musik secara langsung pengunjung juga dapat mendonorkan darah mereka sebagai bentuk kegiatan sosial setelah itu

mereka juga dapat berbelanja atau makan di PWBT. Kerjasama yang sederhana tetapi dapat menciptakan pola baru dalam pengembangan PWBT, kerjasama juga tidak harus dilakukan dengan hal yang berlebih atau sesuatu yang baru yang dapat meningkatkan nilai prestis secara langsung. Kerjasama yang sederhana dan terkonsip juga dapat membangun terbentuknya pengembangan PWBT ke *level* yang lebih baik.

2.2 Peran Masing-Masing *Stakeholder* Dan Keterlibatan Publik

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya peran masing-masing *Stakeholder* sangat berpengaruh untuk kemajuan dari PWBT. Untuk itu perlu adanya analisis yang jelas mengenai peran dari masing-masing *stakeholder*, ini diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan PWBT.

Menurut Grimble (1995) yang dikutip Abdulkarim (2007 : 10), analisis *stakeholder* adalah identifikasi terhadap *stakeholder* sebuah proyek, suatu penilaian terhadap minat dan cara mereka dimana minat ini berpengaruh terhadap resiko dan tingkat kebenaran dari proyek yang dikerjakan, dan dipergunakan untuk mengevaluasi perkembangan kapasitas *stakeholder* tersebut. Analisis bertujuan untuk melihat sejauhmana tindakan yang telah dilakukan oleh masing-masing aktor dalam memenuhi tugas mereka, hal ini akan dapat melihat tingkat keefisienan kinerja mereka selama kurun waktu tertentu.

Untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan peran mereka Noguchi (2006) dalam Abdulkarim (2007 : 54) menyarankan pemakaian 4R dalam melakukan analisis *stakeholder*, yaitu *right* (hak), *responsibilities* (tanggung jawab), *revenue*

(pendapatan), dan *relationships* (hubungan). Tanggung jawab dan hubungan dalam hal ini paling relevan dengan hasil dari temuan penelitian karena untuk melihat interaksi yang terjadi serta aktor yang terlibat maka peran mereka atau tanggung jawab serta hubungan antar dinas atau dalam hal ini kerjasama mereka menjadi faktor utama.

Kebanyakan dalam sebuah kebijakan yang terkait dengan pengembangan UMKM atau PWBT, masing-masing dinas memiliki tugas-tugas yang telah terbagi berdasarkan peraturan yang jelas. Masing-masing aktor yang berperan diharapkan mampu menjalankan tugas-tugas dan bagian mereka semaksimal mungkin, karena dalam beberapa kasus hasil kinerja mereka merupakan *input* bagi aktor lain dan *output* untuk *feedback*. Hal dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Purwanto mengenai pola hubungan interaksi antar *stakeholder*, disana telah dijelaskan berbagai macam bentuk hubungan yang menggambarkan bentuk-bentuk komunikasi dan kerjasama antar aktor terkait dengan kebijakan dan implementasinya.

Semakin kompleks sebuah permasalahan yang diangkat dalam sebuah kebijakan maka akan semakin banyak pula aktor yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. disinilah pentingnya pembagian peran masing-masing aktor tersebut, ketika bekerja dengan sedikit aktor maka pembagian peran akan semakin mudah pula tetapi ketika melibatkan banyak aktor maka pembagian dan analisis peran masing-masing aktor sangat dibutuhkan. Pembagian yang merujuk kepada kemampuan dan tupoksi masing-masing aktor sangat diharapkan mampu menghasilkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Selain itu pembagian

menurut kemampuan dan tupoksi ini dilakukan untuk menghindari dominasi dan monopoli satu aktor terhadap aktor lain, dengan peran yang jelas masing-masing aktor akan memiliki *bergaining position* dimana aktor lain tidak akan dapat mendominasi hal yang menjadi peran dari aktor lain.

Analisis seperti inilah yang perlu dilakukan untuk menciptakan kemajuan di PWBT, tidak hanya sekedar berjalan berdasarkan keinginan masing-masing pihak saja tetapi juga adanya kesinergisan antar aktor dalam menjalankan peran mereka. Keunggulan dan kelemahan masing-masing aktor dalam sebuah analisis nantinya akan muncul dan akan menjadi bahan evaluasi bersama untuk peningkatan menuju hal yang lebih baik lagi. Masing-masing aktor akan saling melengkapi kelemahan dari aktor lainnya bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul aktor lain yang memberikan bantuan untuk menutup kekurangan atau ketidak efisienan dari sebuah kebijakan.

2.3 Hambatan Dalam Proses Penataan Dan Pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang

Nugroho (2012) menyebutkan bahwa dalam setiap implementasi kebijakan publik akan sangat berhubungan dengan faktor internal dan eksternal, baik dalam faktor pendukung maupun penghambat. Menurut pendapat Kuncoro (2003) menyebutkan bahwa yang menjadi faktor utama penghambat kemajuan UMKM adalah permasalahan terkait kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumberdaya manusia,

keterbatasan jaringan usahakerjasama antar pengusaha kecil, dan iklim serta lingkungan usaha yang tidak memadai untuk mampu bersaing dengan pengusaha yang lain. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa faktor utama penghambat dari perkembangan UMKM adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Bila melihat kondisi PWBT, hambatan atau permasalahan dalam proses penataan dan pengelolaan lebih kepada masalah yang terkait dengan penambahan jumlah anggota dan penyediaan lahan usaha baik pembukaan cabang baru maupun relokasi ke tempat yang dapat menampung lebih banyak lagi pelaku usaha.

Permasalahan mengenai penambahan jumlah anggota memang dirasa tidak mungkin untuk diselesaikan dalam jangka waktu dekat, melihat lahan yang digunakan untuk PWBT saja yang berjumlah 459 pedagang sudah memenuhi area luar dari stadion Gajayana Kota Malang. Banyaknya pedagang tidak resmi yang ikut berjualan di sekitar area PWBT menunjukkan bahwa memang PWBT dapat menarik minat masyarakat untuk ikut mearub untung melalui berdagang di wilayah tersebut. Tentu saja hal ini sangat disayangkan bila pemerintah juga tidak mengelola pedagang tidak resmi tersebut, potensi yang diperlihatkan pedagang resmi maupun pedagang tidak resmi tersebut dapat dikatakan sama karena pedagang tidak resmi pun berjualan aneka ragam barang dagangan yang tidak kalah dengan pedagang resmi. Nilai jual yang dihasilkan cukup menjanjikan dan terbilang unik, banyaknya barang-barang baru untuk kebutuhan perkembangan pedagang tidak resmi menciptakan tingkat kemandirian mereka dan daya saing tersendiri bagi pedagang PWBT.

Kemudian permasalahan lahan baru yang diharapkan oleh pedagang sebagai tempat relokasi baru ataupun cabang bagi para pelaku usaha tidak resmi, juga merupakan permasalahan yang sulit dipecahkan pasalnya semenjak relokasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah kota para pedagang merasa masing-masing belum ada tempat yang cocok untuk mereka berjualan dan menampung animo pedagang yang cukup besar tersebut. Dengan lahan Kota Malang yang sangat terbatas dan tidak semua wilayah Kota Malang merupakan pusat kota yang dapat menjadi daya tarik dari masyarakat permasalahan ini menjadi sangat kompleks dan cenderung penting sebagai bahan pertimbangan kemajuan dari PWBT itu sendiri.

Secara garis besar memang permasalahan ini tidak menghambat proses berlangsungnya PWBT, tetapi jika kembali melihat data mengenai tingkat pertumbuhan UMKM di Kota Malang maka semakin banyak pedagang yang datang dan bergabung akan semakin rumit pula penataan dan pengelolaan nantinya. Belum lagi masalah lain yang akan ditimbulkan dari pedagang tidak resmi seperti sampah, kerusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Pedagang tidak resmi selama ini sangat berbeda dengan pedagang resmi pedagang resmi ada retribusi untuk kebersihan setiap minggunya sedangkan pedagang tidak resmi tidak dikenakan biaya tersebut.

Perlu adanya terobosan lain untuk menjembatani permasalahan ini, Cornelis dan Miar (2005) mengatakan bahwa pemerintah perlu menjadi fasilitator dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Fasilitator nantinya akan dapat berfungsi sebagai penampung aspirasi masyarakat dan kemudian akan

dibahas bersama berdasarkan musyawarah mufakat untuk menghasilkan jalan keluar, tetapi selama ini mediasi yang dilakukan Disbudpar hanya sebatas mengenai masalah-masalah yang terkait dengan pemindahan atau relokasi yang dilakukan pemerintah bukan mediasi mengenai aspirasi pedagang dan kebutuhan-kebutuhan mereka.

Perlu diingat tidak semua permasalahan yang menjadi hambatan penataan dan pengelolaan akan terselesaikan dengan menyediakan tuntutan yang diinginkan masih ada cara lain yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut seperti membentuk aliansi baru atau ikatan pedagang tidak resmi pedagang pasar minggu. Hal ini mungkin akan mampu menjembatani permasalahan mereka untuk sementara disamping pemerintah tetap mengusahakan solusi yang tepat untuk tuntutan yang menghambat proses pengelolaan PWBT untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Perlu banyak pertimbangan baik pemerintah maupun pedagang untuk melakukan trobosan-trobosan diluar kebiasaan yang telah dilakukan selama ini, karena trobosan berdasarkan tuntutan ini juga beresiko untuk gagal dan tidak berkembang seperti yang diharapkan di PWBT.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan yang diteliti pada bab sebelumnya, maka peneliti sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Kota Malang terkait dengan Pasar Wisata Belanja Tugu Kota Malang (PWBT) tertuang dalam Sk Walikota Malang nomor 213 tahun 2005, yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan peningkatan pengangguran dan minimnya lapangan kerja melalui pengembangan UMKM dengan konsep pasar wisata. Dalam tahap implementasi kebijakan tersebut Pemerintah Kota Malang menyerahkan segala prosesnya terhadap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengelola dan menata para pedagang sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai Kota Malang dalam mengembangkan UMKM berkonsep pasar wisata. Adapun tindakan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melakukan penataan dan pengelolaan adalah melakukan koordinasi dengan ketua Paguyuban PWBT dan beberapa dinas seperti Dinas Koperasi dan UMK serta Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang. Selain itu upaya

yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyangkut pengembangan potensi PWBT yaitu dengan melakukan pengutan potensi melalui pembinaan dan pelatihan pedagang mengenai kewirausahaan, menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya usaha para pedagang dan aksesibilitas terhadap permodalan, serta melakukan promosi kepada kota-kota lain di luar Kota Malang sebagai bentuk penyebarluasan PWBT kepada Masyarakat.

2. Interaksi antar aktor dalam penataan dan pengelolaan Pasar Wisata Belanja Tugu (PWBT) lebih banyak didominasi oleh kerjasama yang dilakukan antara dinas-dinas yang memiliki kepentingan dalam penataan dan pengelolaan PWBT seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Malang. Sedangkan kerjasama dengan pihak swasta masih belum pernah dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota Malang terkait dengan kendala sewa dan pengembangan lahan. Adapun peran masing-masing aktor yang memiliki kepentingan dalam PWBT telah terbagi secara jelas dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing aktor hanya saja pola hubungan yang terbentuk antara pemerintah dan pedagang masih dirasa sangat renggang dan tidak mencerminkan kepercayaan. Selain itu hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penataan dan pengelolaan adalah tuntutan untuk pengembangan jumlah anggota serta penyediaan lahan atau cabang yang dapat menampung jumlah pedagang lebih banyak dari jumlah semula yaitu 459 anggota.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diangkat, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan pola koordinasi yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan para pedagang PWBT terkait dengan penataan dan pengelolaan. Peralunya selama ini semua urusan yang terkait dengan teknis lapangan diserahkan kepada ketua paguyuban untuk mengatur dengan dalih menghormati keinginan mereka. Seharusnya Dinas juga ikut terlibat dalam teknis lapangan sehingga jelas ketika ada pengaturan dan pengelolaan yang menyalahi aturan atau tidak seharusnya dilakukan langsung mendapat teguran dan perbaikan.
2. Terkait dengan upaya strategis untuk pengembangan potensi PWBT pemerintah harus lebih serius lagi dalam melakukan promosi, tidak hanya sekedar melalui selebaran dan studibanding yang dilakukan kota lain tetapi juga perlu adanya promosi media elektronik maupun cetak yang berskala nasional. Diperlukannya promosi seperti ini agar wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kota Malang juga menyempatkan diri untuk mampir di PWBT sebagai bentuk *feedback* dari promosi yang dilakukan, sebagai kota wisata rasanya kurang pas bila pemerintah hanya mempromosikan tempat-tempat yang murni merupakan tempat wisata.
3. Pentingnya melakukan kerjasama baik dengan pihak swasta dan

masyarakat secara keseluruhan, pengembangan kerjasama yang telah dijelaskan tidak selalu harus berbentuk kerjasama yang formal kepada pihak swasta untuk mengembangkan tetapi kerjasama juga dapat dilakukan kepada masyarakat yang memiliki andil dalam menjalankan *event-event* di Kota Malang. Dengan kerjasama yang sederhana dan terpola baik akan menarik minat wisatawan dan masyarakat untuk berkunjung ke PWBT.

4. Perlunya pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang menghambat berkembangnya PWBT yaitu keinginan untuk menambah jumlah anggota PWBT serta lahan yang memadai untuk jumlah anggota yang cukup banyak tersebut. Paling tidak yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah memberikan jembatan atas permasalahan tersebut mengingat potensi yang diperlihatkan oleh PWBT sangat tinggi dan berdampak pada perekonomian, belum lagi menyangkut dengan perkembangan sektor UMKM di Kota Malang yang setiap tahun meningkat. Atau setidaknya permasalahan ini dapat menjadi agenda kebijakan Kota Malang walaupun bukan merupakan agenda utama dari kebijakan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, Saipol Barl, et al. 2007. *A Review On The Issues And Strategic Og Stakeholder Management In The Construction Industry*. Mimeo, Agustus 2007. Shah Alam. Selangor, Malaysia.
- Adhi, Adrianus Surya Online, 2 Februari 2014. *Jalan Semeru Masih Semrawut*. Diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com/>
- Akmal. 2006. *Koordinasi Antar Instansi Terkait Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Daerah*. Jurnal Demokrasi Vol.5 No. 1 tahun 2006. Universitas Negeri Padang
- Berita Resmi Statistik No. 26 / VI / 12 Mei 2012*. Diakses dari <http://bps.go.id/>.
- Boonstra, Albert. 2006. *Managing Stakeholder Around interorganizational sistem: A diagnostic approach*. Jurnal of Strategic Information System 17 (2006) 190-201. University of Groningen, Faculty of Economics & Business, Landleven 7/P.O. Box 800, 9700 AV Groningen. The Netherlands.
- Cornelis, Rintuh dan Miara, 2005, *Kelembagaan Dan Ekonomi Rakyat*, BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian*. Jurnal Litbang Pertanian, vol 26 No 3 2007, 88-89.
- Jennings, Simon. (1998). *The Complete Guide to Advanced Illustration and Design, Amerika*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, J.L.(2009). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasalong, Harbaning. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Dalam Negeri No.2.1987." *Pedoman Penyusunan Rencana Kota*", diakses pada tanggal 20 Februari 2014 dari <http://kpu.go.id/>.
- Purwanto, Agus Erwan, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Gava Media
- Rachbini, Didik J. 2002. *Ekonomi Politik (Paradigma dan Teori Pilihan Publik)*. Bandung : Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2011. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryanto, Adi. 2008. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.

Undang-Undang No.32.2004.” Tentang Pemerintahan Daerah”, diakses pada tanggal 20 Februari 2014 dari <http://kpu.go.id/>.

Voge, Wilf. *Stakeholder commitment: why is it important?*. ExecutiveBrief. 2009. Melalui <http://www.projectsart.co.uk/stakeholder-commitment-why-is-it-important.html>, Diakses tanggal 20 Maret 2014.

Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedi Publishing.



CURRICULUM VITAE

Nama : Lingga Perkasa
NIM : 105030100111021
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 11 januari 1992
Pendidikan : 1. SD Negeri 9 Malang tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 21 Malang tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 5 Malang tamat tahun 2010
4. S-1 FIA Universitas Brawijaya masuk tahun 2010 lulus tahun 2014

